

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized



# Janji Pendidikan di Indonesia

IKHTISAR



# Janji Pendidikan di Indonesia



Australian Government

Publikasi ini disusun oleh staf Bank Dunia dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia. Hasil temuan, interpretasi dan kesimpulan yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mewakili pandangan Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia maupun organisasi-organisasi yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin akurasi data yang tercantum dalam publikasi ini. Batas-batas, warna, denominasi, dan informasi lain yang ditampilkan pada peta mana pun di dalam publikasi ini tidak menyiratkan penilaian apa pun dari pihak Bank Dunia mengenai status hukum suatu wilayah, atau dukungan maupun penerimaan terhadap batasan tersebut.

#### **Hak dan Izin**

© 2020 Bank Dunia  
1818 H Street NW, Washington DC 20433  
Telepon: 202-473-1000; Internet: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

Sebagian hak cipta dilindungi Undang-Undang

Materi dalam publikasi ini memiliki hak cipta. Karena Bank Dunia sangat mendukung penyebaran pengetahuan, publikasi ini boleh diproduksi ulang, secara keseluruhan atau sebagian, untuk tujuan non-komersil selama mencantumkan secara lengkap atribusi untuk publikasi ini. Berbagai pertanyaan lainnya yang terkait dengan hak dan perizinan, termasuk hak tambahan, harap dialamatkan kepada Kantor Penerbit Bank Dunia (World Bank Publication), The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; faks: 202-522-2625; e-mail: [pubrights@worldbank.org](mailto:pubrights@worldbank.org).

#### **Atribusi**

Harap mengutip publikasi ini sebagai berikut: "World Bank. 2020. Janji Pendidikan di Indonesia. © World Bank."

#### **Kredit foto**

Halaman 9, 48, 91, Achmad/Bank Dunia; halaman 10, 43, 46, 138, Fauzan Ijazah/Bank Dunia; halaman 40, Atet Dwi Pramadia/ Bank Dunia; halaman 59; halaman 81, 83, 92, 109, Bank Dunia; halaman 118, Gratsias Adhi Hermawan/Shutterstock; page 123, UX Indonesia/Unsplash; halaman 133, Nugroho Nurdikiawan Sunjoyo/ Bank Dunia. Foto lainnya: Akhmad Dody/ Bank Dunia.

# Daftar isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>iv</b>
oleh Satu Kahkonen Country Director, World Bank Indonesia and Timor Leste	
<b>Kata Sambutan</b>	<b>v</b>
oleh Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	
<b>Ucapan terima kasih</b>	<b>vi</b>
<b>Singkatan dan Akronim</b>	<b>vii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>1</b>
Indonesia telah meraih banyak kemajuan...	1
...tetapi masih butuh peningkatan pembelajaran	2
Bersekolah untuk belajar	2
Rekomendasi utama laporan	5
Menanggapi tantangan COVID-19	8
Memfaatkan janji pendidikan	10
Referensi	11
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah	11
<b>Kesimpulan</b>	<b>13</b>
Bersekolah untuk belajar	13
Dampak dan tanggapan terhadap pandemi COVID-19	15
Rekomendasi ke-12: Sebagai bagian dari tanggapan dan pemulihan COVID-19, perkuat sistem untukantisipasi guncangan dan tekanan di masa depan	22
Sintesis rekomendasi	22
Langkah Ke Depan	25
Penutup	26
Referensi	26
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah	27
<b>Tabel</b>	
ES.1 Struktur dan fungsi sistem pendidikan Indonesia setelah desentralisasi	3
ES.2 Dampak langsung krisis terhadap sekolah, mulai 6 Juni 2020	8
C.1 Indikator TIK Indonesia (persen)	18
C.2 Ringkasan rekomendasi utama	19
<b>Gambar</b>	
ES.1 Koherensi dan keselarasan untuk pembelajaran	5
C.1 Koherensi dan keselarasan untuk pembelajaran	15
C.2 Proyeksi tren skor PISA akibat COVID-19	15
C.3 Alur perubahan sistem pendidikan pada krisis COVID-19	17
<b>Kotak</b>	
ES.1 Dua belas landasan untuk memperkuat pembelajaran	6
ES.2 Mendukung human capital selama krisis COVID-19	9
C.1 Mengukur kesehatan sistem pendidikan	13

## Kata Pengantar

Pendidikan dan pembangunan manusia merupakan agenda penting pembangunan pemerintah Indonesia. Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam bidang pendidikan selama dua dekade terakhir. Sejak awal 2000-an, Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi di bidang pendidikan, termasuk peningkatan anggaran pendidikan. Reformasi ini telah memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu. Angka partisipasi siswa yang telah meningkat hingga 31 persen sejak 2002 telah berkontribusi pada pertambahan lebih dari 10 juta siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Indonesia juga telah menunjukkan kemajuan besar dalam kesetaraan gender dalam pendidikan. Pada tahun 1975, 65 persen dari murid adalah murid laki-laki, sementara saat ini proporsi murid perempuan dan laki-laki kurang lebih sama.

Terlepas dari pencapaian penting ini, siswa Indonesia masih belum dapat mencapai seluruh potensinya. Sumber daya manusia — akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan seseorang sepanjang hidupnya — sangat penting untuk kesuksesan Indonesia di masa depan. Salah satu tantangan utamanya adalah anak-anak Indonesia kekurangan waktu belajar. Bersekolah tidak dapat selalu disamakan dengan belajar — siswa Indonesia rata-rata bersekolah selama 12,4 tahun, sedangkan proses belajar yang mereka tempuh hanya setara dengan 7,8 tahun (Human Capital Index 2020). Segala hal yang mereka pelajari selama mengikuti pendidikan — dari taman kanak-kanak sampai universitas — akan menjadi faktor penentu keterampilan yang mereka miliki saat memasuki dunia kerja ketika mereka sudah dewasa. Meskipun tingkat pembelajaran untuk semua anak perlu ditingkatkan, siswa yang kurang mampu — seperti anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang tinggal di daerah terpencil, atau penyandang disabilitas — biasanya tertinggal jauh, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan.

Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung telah menghadirkan berbagai tantangan baru dan mengharuskan adanya transisi proses pembelajaran dengan melaksanakan proses belajar dari rumah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun pemerintah telah mengambil banyak langkah tepat waktu untuk mendukung pembelajaran

dari rumah, pandemi masih cenderung mengganggu proses belajar dan memperlebar ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. Tantangan Indonesia sekarang adalah untuk merebut kembali waktu belajar yang hilang tersebut, sembari terus memperkuat sistem pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran bagi semua anak.

Beberapa langkah yang diterapkan dalam merespons COVID-19 juga dapat ditetapkan untuk memperkuat sistem pendidikan dalam jangka panjang. Misalnya, pemerintah telah mengumumkan rencana penilaian untuk mengidentifikasi tingkat pembelajaran siswa, sehingga guru dapat menyesuaikan materi belajarnya dan memberikan dukungan tambahan. Penilaian ini akan digunakan untuk memantau kemajuan siswa selama pembelajaran jarak jauh dan saat anak-anak kembali bersekolah, saat sekolah sudah dibuka kembali. Rekomendasi utama dari laporan ini adalah fokus pada pemahaman tentang seberapa banyak waktu belajar yang dihabiskan anak-anak dan pemberian dukungan berdasarkan kebutuhan mereka. Rekomendasi tersebut dapat menjadi cara yang lebih permanen untuk meningkatkan pengajaran. Demikian pula, investasi dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran daring saat ini juga dapat membuat sistem pendidikan yang lebih tangguh jika terjadi krisis lain di masa depan.

Laporan ini memberikan serangkaian opsi bagi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat reformasi pendidikan dan meningkatkan hasil pembelajaran semua siswa Indonesia. Rekomendasi tersebut fokus pada perlindungan dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kapasitas, kesetaraan, dan akuntabilitas pembelajaran. Laporan ini juga membahas secara detil tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik lagi di bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan bagaimana memberikan bimbingan dan dukungan yang lebih baik kepada provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.

Semoga rekomendasi ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi, guru, siswa, dan orang tua — semua pemangku kepentingan, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.

**Satu Kahkonen**  
Country Director, World Bank  
Indonesia and Timor-Leste

## Kata Sambutan

**D**engan senang hati saya menyambut baik terbitnya Janji Pendidikan di Indonesia.

Laporan ini tidak hanya penting bagi pemerintah dan mitra pembangunan, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sistem pendidikan Indonesia. Laporan ini menyoroti kemajuan besar yang telah dicapai Indonesia dalam pendidikan, serta tantangan yang akan dihadapi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tengah melakukan serangkaian reformasi melalui kebijakan Merdeka Belajar. Sesuai dengan namanya, kebijakan tersebut memberikan kebebasan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis kearifan lokal, ketersediaan infrastruktur, serta faktor sosial ekonomi dan budaya.

Banyak rekomendasi laporan ini yang selaras dengan agenda reformasi pendidikan di Indonesia. Misalnya, laporan ini menyarankan penggunaan kajian untuk mengidentifikasi siswa dan sekolah yang tertinggal dan memberikan dukungan tambahan untuk membantu meningkatkan kinerja mereka. Hal ini sejalan dengan keputusan kami untuk meniadakan ujian nasional dan mengadopsi alat penilaian baru pada tahun 2021 — Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Penilaian baru akan memetakan kemampuan siswa dalam bahasa (literasi) dan matematika (berhitung). Keduanya akan mengukur bukan hanya pada kemampuan membaca siswa, tetapi juga tingkat pemahaman bacaan mereka, serta kemampuan mereka bukan hanya perhitungan saja, namun juga melakukan analisis. Hasil dari penilaian ini juga akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mendukung setiap daerah dan sekolah yang memiliki performa rendah dalam mata pelajaran tertentu, serta tiap individu siswa.

Seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas, kesetaraan, dan akuntabilitas untuk belajar dan membantu semua anak Indonesia agar dapat memaksimalkan potensi mereka dan memperkuat sumber daya manusia kita, seperti yang direkomendasikan oleh laporan tersebut. Kami telah meluncurkan program percontohan Penggerak Guru, yang bertujuan untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada pembelajaran siswa. Sebagai bagian dari uji

coba, kami memberikan pelatihan dan on-the job coaching kepada 2.800 guru dari 56 kabupaten. Guru-guru ini diharapkan menjadi agen perubahan baik di sekolah maupun di daerah mereka — mendukung perkembangan anak secara menyeluruh dan bertindak sebagai narasumber bagi guru lainnya. Rencana kami adalah menjangkau 400.000 guru selama lima tahun.

Teknologi juga dapat membantu mempercepat program reformasi kita. Kita telah melihat bahwa pandemi COVID-19 telah membawa perubahan sangat besar di sektor pendidikan, mengingat penutupan sekolah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak Maret 2020, langkah-langkah telah dilakukan untuk mendukung pembelajaran dari rumah. Ini termasuk mendukung guru untuk mengajar secara online, memberikan kuota internet gratis untuk siswa dan guru, menyajikan program TV pendidikan untuk siswa tanpa akses internet, dan memberikan sekolah pilihan untuk menggunakan kurikulum pendidikan yang disederhanakan. Sebagian besar pelatihan guru sekarang dilakukan secara online, dan siswa belajar dari rumah menggunakan berbagai cara — buku, tv, internet, dan WhatsApp, perubahan besar dari beberapa bulan yang lalu, dan satu langkah menuju sistem pendidikan yang lebih tangguh.

Namun, seperti negara lain di dunia, kami sedang mengatasi cara untuk meminimalkan kerugian belajar, menjembatani kesenjangan digital, dan memastikan bahwa semua anak belajar selama pandemi. Kami terus mencari solusi dalam mengatasi tantangan baru terkait COVID-19 dan untuk mengatasi tantangan yang sudah ada, bersama dengan mitra pembangunan dan masyarakat sipil. Kami menyambut baik laporan ini dan rekomendasinya sebagai bagian dari diskusi yang sedang berlangsung ini.

Saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada tim World Bank yang berkontribusi pada laporan penting ini, dan kepada Pemerintah Australia atas kemurahan hati mereka dalam mendukung penyusunannya.

**Nadiem Makarim**  
**Menteri Pendidikan**  
**dan Kebudayaan**  
**Republik Indonesia**

## Ucapan Terima Kasih

Laporan ini ditulis oleh tim yang dipimpin oleh Noah Yarrow dan Andy Ragatz, terdiri atas Rythia Afkar, Petra Bodrogini, Jonthon Couslon, Sangeeta Dey, Deepali Gupta, Susiana Iskandar, Ratna Kesuma, Citra Kumala, Javier Luque, Sylvia Njotomihardjo, Rosfita Roesli, Jamil Salmi, Santoso, Sheldon Shaef-fer, Dewi Susanti, Ruwiyati Purwana, Alexander Michael Tjahjadi, dan and Wisnu Harto Adi Wijoyo. Tim sangat berterima kasih kepada para pereview Kathleen Whimp dan Fadila Caillaud, dan kepada Camilla Holmemo yang telah memberikan masukan serta bimbingan. Secara keseluruhan, penulisan laporan ini di bawah bimbingan Satu Kahkonen (Country Director untuk Indonesia dan Timor Leste) dan Toby Linden (Practice Manager bagian Pendidikan untuk Wilayah Asia Timur dan Asia Pasifik). Lestari Boediono, GB Surya, Jerry Kurniawan dan Mauliyati Nuraini memberikan dukungan dalam mengelola situs web dan acara peluncuran. Tim di Communications Development Incorporated, dipimpin oleh Bruce Ross-Larson dan termasuk Joe Brinley, Joe Caponio, Jeremy Clift, Meta de Coquereaumont, Mike Crumplar, Peter Redvers-Lee, Christopher Trott, dan Elaine Wilson, yang telah mengedit, mendesain dan mengatur layout laporan.

Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade yang telah mendanai penelitian dan penerbitan laporan ini.

# SINGKATAN DAN AKRONIM

<b>3T</b>	Terdepan, Terluar, Tertinggal	<b>LPTK</b>	Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan
<b>AKM</b>	Asesmen Kompetensi Minimum	<b>MoU</b>	Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
<b>AKSI</b>	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia	<b>OECD</b>	Organisation for Economic Co-operation and Development
<b>APBN-P</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan	<b>PAUD</b>	Pendidikan Anak Usia Dini
<b>APS</b>	Angka Putus Sekolah	<b>PDB</b>	Produk Domestik Bruto
<b>BAN-PT</b>	Badan Akreditasi Nasional–Perguruan Tinggi	<b>PIRLS</b>	Progress in International Reading Literacy Study
<b>Bappenas</b>	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	<b>PISA</b>	Programme for International Student Assessment
<b>BOP</b>	Bantuan Operasional Pendidikan	<b>PNS</b>	Pegawai Negeri Sipil
<b>BOS</b>	Bantuan Operasional Sekolah	<b>PPAUD</b>	Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini
<b>CSR</b>	Corporate Social Responsibility	<b>SD</b>	Sekolah Dasar
<b>DAPODIK</b>	Data Pokok Pendidikan	<b>SISNAKER</b>	Sistem Informasi Ketenagakerjaan
<b>Depag</b>	Departemen Agama	<b>SMA</b>	Sekolah Menengah Atas
<b>Dikti</b>	Pendidikan Tinggi	<b>SMK</b>	Sekolah Menengah Kejuruan
<b>Diktis</b>	Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan	<b>SMP</b>	Sekolah Menengah Pertama
<b>Ditjen</b>	Direktorat Jenderal	<b>SPN</b>	Standar Pendidikan Nasional
<b>EdTech</b>	Education technology	<b>SUPAS</b>	Survei Penduduk Antar Sensus
<b>EMIS</b>	Education Management Information System	<b>SUSENAS</b>	Survei Sosial Ekonomi Nasional
<b>Kemdikbud</b>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<b>TIK</b>	Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
<b>Kemenag</b>	Kementerian Agama	<b>TIMSS</b>	Trends in International Mathematics and Science Study
<b>Kemendagri</b>	Kementerian Dalam Negeri	<b>TPB</b>	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
<b>Kemenkeu</b>	Kementerian Keuangan	<b>TV</b>	Televisi
<b>Kemenpan RB</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<b>UN</b>	Ujian Nasional
<b>Kemnaker</b>	Kementerian Tenaga Kerja	<b>USBN</b>	Ujian Sekolah Berbasis Nasional
<b>Kemsos</b>	Kementerian Sosial		
<b>KIP</b>	Kartu Indonesia Pintar		
<b>LPMP</b>	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan		

# Ringkasan Eksekutif



Dalam pidatonya setelah terpilih kembali di tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo “Jokowi” mengungkapkan visinya untuk mengembangkan Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif yang akan menjadikan negara ini sebagai salah satu negara terkuat di dunia. Jokowi menekankan bahwa kunci keberhasilan masa depan Indonesia yang lebih makmur adalah mengembangkan sumber daya manusia.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan kemakmuran, Indonesia membutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kesejahteraan warganya, meningkatkan modal manusianya, dan mencapai tujuan ekonomi dan pembangunannya. Sistem yang diterapkan saat ini menghasilkan pembelajaran pada tingkat yang jauh di bawah yang dibutuhkan anak-anak dan remaja Indonesia saat ini, di mana hanya 30 persen anak-anak Indonesia yang mencapai skor minimum dalam membaca di PISA.<sup>2</sup> Ini adalah krisis pembelajaran. Untuk mencapai visi Presiden tersebut, diperlukan perubahan menyeluruh dalam sistem pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mendukung negara berpartisipasi penuh dalam revolusi industri keempat, sekaligus memanfaatkan keuntungan bonus demografi Indonesia.

Setiap tahun, 4,2 juta orang Indonesia lulus dari sistem pendidikan (Susenas 2018). Rata-rata siswa lulus pada usia 16 tahun dengan lama pendidikan 11 tahun. Tetapi banyak dari lulusan pendidikan menengah yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja dan akhirnya menerima pekerjaan bergaji rendah. Keterampilan yang rendah mencerminkan pendidikan dasar yang buruk dan keselarasan antara kurikulum lembaga pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang buruk. Banyak siswa tidak mampu mencapai tingkat penguasaan minimum dalam membaca dan matematika, dan mengingat mereka menempuh perguruan tinggi maupun pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, kurikulum yang diajarkan cenderung tidak selaras dengan kebutuhan pasar saat ini dan yang diperkirakan akan dibutuhkan pada Industri 4.0.

Laporan Utama tentang Pendidikan di Indonesia ini membahas tentang cara-cara untuk memantapkan reformasi pendidikan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa di Indonesia. Laporan ini berfokus pada bagaimana agar sistem pendidikan sebagaimana yang dijanjikan dapat menghasilkan *human capital* atau modal manusia sebagai modal pembangunan di Indonesia. Rekomendasi ini fokus pada perlindungan dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kapasitas, kesetaraan, dan akuntabilitas pembelajaran. Laporan ini juga membahas secara detail apa

saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik lagi di bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan bagaimana memberikan bimbingan dan dukungan yang lebih baik kepada provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah. Tidak mungkin ada satu pemerintahan yang berhasil melakukan semua reformasi yang direkomendasikan pada laporan ini pada waktu yang bersamaan. Ringkasan ini tidak dimaksudkan untuk memprioritaskan hal tersebut karena kompromi-kompromi dalam memilih antara pendidikan anak usia dini, pelatihan guru, dan pengembangan keterampilan profesional tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dan terkait urusan keuangan. Rekomendasi di sini dimaksudkan sebagai panduan berbasis bukti sebagai informasi dalam proses pertimbangan oleh pembuat kebijakan, pelaksana, guru, siswa, dan orang tua — seluruh pemangku kepentingan di masa depan Indonesia. Dokumen ini memberikan beberapa hal yang perlu disoroti dari laporan “Janji Pendidikan di Indonesia” dalam Bahasa Indonesia. Untuk laporan versi lengkapnya, silakan lihat: [TAUTAN](#).

### **Indonesia telah meraih banyak kemajuan...**

Pendidikan merupakan agenda penting dalam pembangunan pemerintah Indonesia. Sejak awal 2000-an, Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi pendidikan, termasuk desentralisasi sistem pendidikan (tabel ES.1),<sup>3</sup> perbaikan kualifikasi guru, dan peningkatan anggaran pendidikan, yang naik menjadi 200 persen secara riil dari tahun 2002 hingga 2018. Reformasi ini telah memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu. Peningkatan anggaran pendidikan yang diamanatkan dalam amandemen Undang-undang Dasar pada tahun 2002, mampu membiayai perluasan layanan pendidikan dan meningkatkan jumlah guru untuk sekolah baru dan ruang kelas baru, serta untuk taman kanak-kanak dan program anak usia dini (World Bank 2018b).

Saat ini, sistem pendidikan Indonesia merupakan sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia. Secara keseluruhan pendidikan formal melibatkan 3,3 juta guru yang mendidik 53,1 juta anak di kelas 1 hingga kelas 12 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Sejumlah 231.446 layanan pendidikan anak usia dini mendukung pembelajaran 7,4 juta anak (DAPODIK Kemendikbud 2019). Dan 4.670 lembaga pendidikan tinggi memberikan layanan kepada sekitar 8 juta siswa. Sistem pelatihan kejuruan nonformal terdiri lebih dari 4.000

lembaga di bawah pengawasan Kemdikbud dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta beberapa kementerian terkait (MoU Lima Kementerian 2016).

### **...tetapi masih butuh peningkatan pembelajaran**

Meskipun telah mencapai kemajuan penting dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar siswa di Indonesia tidak memenuhi target hasil belajar nasional yang telah ditetapkan. Ukuran pembelajaran menunjukkan adanya berbagai tantangan di tahun-tahun awal pendidikan, dan tingkat pembelajaran tetap rendah saat siswa naik kelas. Tingkat pembelajaran tergolong rendah, baik secara absolut, yakni di bawah target nasional, dan secara relatif jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga (World Bank 2018b). Untuk mencapai potensi *human capital* dan mengatasi krisis pembelajaran ini, Indonesia harus segera mulai melakukan pendekatan yang berbeda.

Telah terjadi ketimpangan pembelajaran yang tinggi antar daerah, antar sekolah, dan di dalam sekolah. Beberapa provinsi di Indonesia, terutama yang berada di Wilayah Tengah, berprestasi baik dalam Ujian Nasional (UN), sementara di daerah lain, umumnya di Wilayah Timur dan paling Barat, berprestasi rendah. Perbedaan nilai rata-rata di tiga provinsi berprestasi terbaik dan di tiga provinsi berprestasi terendah dalam ujian SMA (Kelas 12) adalah 21 poin (skala 100). Hanya 4 dari 34 provinsi yang memiliki nilai rata-rata SMA di atas nilai kelulusan minimum, yaitu 55. Hasil UN lebih rendah bahkan terjadi di Kelas 9 (SMP) serta SMK (Kelas 12).<sup>4</sup> Kabupaten dengan pendapatan yang lebih tinggi, pusat-pusat kota besar, dan wilayah yang memiliki kapasitas implementasi yang lebih tinggi cenderung memiliki hasil UN yang lebih baik daripada daerah yang berpendapatan lebih rendah, seperti di daerah pedesaan dengan kapasitas implementasi yang rendah pula (World Bank 2013).

Perubahan kebijakan terbaru dalam penilaian hasil belajar (Permendikbud No. 43/2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional) menunjukkan ke arah yang benar. Dalam perkembangan besar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan penghentian UN dengan menyatakan, "Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter."<sup>5</sup> Akibat COVID-19, Kemendikbud membatalkan ujian nasional lebih awal dari yang direncanakan pada tahun 2020 (Surat Edaran Kemdikbud No. 4/2020). Kemenag ikut serta dalam gerakan

menuju penilaian formatif berbasis luas untuk menginformasikan guru tentang kebutuhan belajar siswa, dengan berkomitmen pada pendekatan ujian yang direvisi lebih awal (World Bank 2019). Kerangka penilaian siswa saat ini berada dalam masa transisi. Hal ini sangat penting perlu diperbaiki agar dapat membantu mendorong sistem pendidikan di semua tingkatan untuk berfokus pada peningkatan pembelajaran siswa.

Kewenangan Kemendikbud difokuskan pada rekrutmen guru PNS, penetapan kurikulum dan standar kompetensi, dan penyelenggaraan penilaian hasil belajar siswa. Hal ini berarti bahwa masukan dasar untuk pembelajaran siswa — seperti ketersediaan dan kualitas buku teks dan materi pengajaran dan pembelajaran lainnya, serta pelatihan dan pemantauan guru dalam masa jabatan serta dukungan untuk guru, kepala sekolah, dan sekolah — sebagian besar berada di bawah kewenangan kabupaten dan provinsi. Untuk meningkatkan pembelajaran siswa, anggaran dan inisiatif di tingkat daerah perlu diselaraskan dengan peraturan dan dukungan pembelajaran di tingkat pusat. Kurangnya keselarasan antara prestasi siswa dan sistem untuk standar pemantauan perlu diubah agar hasil belajar siswa dapat meningkat pada skala besar.

### **Bersekolah untuk belajar**

Bersekolah tidak selalu sama dengan belajar — hal ini berulang kali ditekankan dalam Laporan Pembangunan Dunia tahun 2018 (World Bank 2018d). Untuk melanjutkan reformasi pendidikan dan mencapai hasil yang lebih baik, reformasi di Indonesia harus mencapai kemajuan di tiga bidang:

- *Melakukan penilaian pembelajaran untuk menjadikannya sebagai tujuan yang serius.* Penilaian siswa yang dirancang dengan baik harus diterapkan untuk mengukur kesehatan sistem pendidikan, dan bukan menjadi alat untuk memberikan penghargaan dan memberikan hukuman. Hasil dari pengukuran pembelajaran ini harus digunakan untuk menyoroti berbagai pengecualian yang tidak nampak, menjadi dasar dalam membuat pilihan untuk mengarahkan bantuan, dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai.
- *Bertindak berdasarkan bukti agar sekolah memberikan manfaat optimal bagi semua siswa.* Jumlah dan kualitas bukti cara belajar telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan peningkatan inovasi pendidikan. Indonesia dapat memanfaatkan bukti ini secara lebih baik

**TABEL ES.1 Struktur dan fungsi sistem pendidikan Indonesia setelah desentralisasi**

Kegiatan	Pemerintah pusat	Provinsi	Kabupaten/kota	Sekolah/kepala sekolah
Pengelolaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pendidikan nasional</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah menengah atas</li> <li>• Pendidikan khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah Dasar</li> <li>• Sekolah Menengah Pertama</li> <li>• Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan masing-masing sekolah — perencanaan, penganggaran, sekolah</li> <li>• Evaluasi mandiri</li> </ul>
Pengembangan kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum nasional untuk pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum muatan lokal untuk pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan kurikulum muatan lokal</li> </ul>
Akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akreditasi untuk pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal</li> </ul>			
Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian pelatihan pendidik, perekrutan staf pengajar tetap, transfer pendidik,</li> <li>• dan pengembangan karir pendidik</li> <li>• Transfer tenaga pendidik dan tenaga kependidikan antarprovinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfer tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi dan mutasi transfer tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu wilayah kabupaten/kota</li> <li>• Merekrut guru dengan kontrak pada tingkat kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengangkat guru melalui kontrak dengan sekolah</li> </ul>
Perizinan pada bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan untuk universitas swasta</li> <li>• Izin operasi untuk unit pendidikan asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan untuk pendidikan menengah swasta</li> <li>• Perizinan untuk pendidikan khusus swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan untuk pendidikan dasar swasta</li> <li>• Perizinan untuk pendidikan anak usia dini swasta dan pendidikan nonformal swasta</li> </ul>	
Bahasa dan sastra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahasa dan sastra lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahasa dan sastra yang penuturnya ada di wilayah kabupaten/kota</li> </ul>	
Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengawasi dan melaksanakan penilaian keterampilan siswa berdasarkan populasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerja sama dengan sekolah dalam mengembangkan penilaian siswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian kinerja guru</li> <li>• Penilaian mandiri sekolah terhadap standar nasional pendidikan</li> </ul>

Sumber: UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah.

untuk menentukan prioritas bagi praktik dan inovasi pembelajaran di Indonesia.

- *Meningkatkan kerjasama para pelaku pendidikan agar seluruh sistem dapat berfungsi untuk pembelajaran.* Inovasi di ruang kelas tidak akan berdampak banyak jika sistem secara keseluruhan tidak mendukung pembelajaran. Dengan mempertimbangkan hambatan teknis dan politis serta mobilisasi pemangku kepentingan, Indonesia dapat mendukung para pendidik yang inovatif yang berada di di garis depan.

### Melakukan penilaian pembelajaran— untuk menjadikannya sebagai tujuan yang serius

Di Indonesia, penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengarahkan sistem pendidikan dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, kapasitas kelembagaan, politik, dan pembatasan ad hoc, serta variabel-variabel lainnya. Reformasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkuat penilaian pembelajaran dengan menggunakan ujian berbasis komputer — bersama dengan reformasi struktural baru-baru ini untuk mendesain kembali mekanisme penilaian

dan hal-hal yang mendasari perkembangan pembelajaran siswa— telah menuju ke arah yang benar, dan diharapkan banyak perkembangan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

Ujian dan penilaian yang telah dilaksanakan selama ini menghasilkan berbagai kelemahan pembelajaran. Indonesia telah berpartisipasi dalam semua tes internasional penting yang dilaksanakan sejak tahun 1990, termasuk *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Program for International Student Assessment* (PISA). Hal ini memungkinkan dilakukannya perbandingan antar negara dan antar waktu dalam hasil pembelajaran yang dapat mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki dan bidang-bidang yang harus diperbaiki.

Seperti disebutkan di atas, Indonesia sedang bergerak menuju penilaian formatif berbasis luas di semua kelas yang nantinya dapat memberikan informasi bagi guru mengenai kebutuhan pembelajaran siswa dan merancang penilaian nasional untuk kelas 5, 8, dan 11. Arah baru penilaian siswa dan sistem tampak sangat positif, tetapi hal ini akan membutuhkan basis dukungan yang luas agar dapat berkelanjutan dan efektif. Kerangka penilaian siswa yang baru harus dirancang, dikomunikasikan, dan dilaksanakan sedemikian rupa agar mampu mendapatkan dukungan dari konstituen inti, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat sipil.

### **Bertindak berdasarkan bukti—agar sekolah memberikan manfaat optimal bagi semua siswa**

Tindakan harus didasarkan pada hasil pengukuran. Untuk melakukannya, hasil pengukuran harus dapat diakses para pemangku kepentingan. Pengukuran pembelajaran dapat mendorong pengambilan tindakan dengan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam penciptaan hasil tersebut dan dengan menyediakan informasi untuk reformasi (World Bank 2018d). Perlu menyediakan informasi tentang pembelajaran dan perlu membantu para pemangku kepentingan utama, termasuk guru, orang tua, kabupaten, dan provinsi, memanfaatkan informasi tersebut. Informasi ini dapat dibuat dalam bentuk penilaian siswa, dan juga dalam bentuk instrumen-instrumen seperti Indeks Mutu Pendidikan yang diusulkan (lihat bab 5), yang dimaksudkan untuk merangkum informasi penting yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan memastikan tanggung jawab, keterlibatan, dan pemberdayaan yang lebih besar dari para pelaku pendidikan yang terdesentralisasi dalam menanggapi berbagai tantangan pembelajaran di

tingkat lokal. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan merupakan tantangan yang sangat berat, sangat tidak sesuai dengan tanggapan yang homogen yang diberikan secara nasional. Untuk mendorong tanggapan daerah yang lebih efektif, kabupaten memerlukan dukungan dalam memahami berbagai tantangan pendidikan yang mereka hadapi dan sumber daya yang telah mereka miliki untuk mengatasi tantangan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak lainnya, dapat mengambil peran yang lebih kuat dalam membantu daerah untuk menentukan tantangan terkait pembelajaran mereka, menyediakan sumber daya untuk menanggapi hambatan-hambatan yang ditemukan, dan memastikan bahwa sistem pendidikan tetap fokus pada pembelajaran.

Bupati, birokrat, pendidik, dan orang tua perlu memahami bahwa sistem pendidikan sekarang ini gagal membuat anak memiliki keterampilan dasar literasi dan berhitung. Mereka dapat memahami masalah ini bukanlah masalah nasional, namun masalah lokal, yang relevan dengan diri mereka dan anak-anak mereka sendiri. Mereka juga akan mendapat manfaat jika mereka dapat melihat di bidang apa saja mereka berhasil, sehingga mereka tahu dari mana mereka harus memulai perubahan yang lebih baik lagi. Ini berarti, mereka membutuhkan data yang penting pada tingkat kabupaten, sekolah, dan kelas. Guru perlu memiliki kemampuan dan fleksibilitas untuk menyesuaikan pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan para siswanya, dan kepala sekolah—dan pengawas sekolah— juga memiliki kemampuan untuk mendukung para guru dalam melakukannya.

### **Meningkatkan kerjasama pelaku pendidikan — agar seluruh sistem dapat berfungsi untuk pembelajaran**

Sistem pendidikan membutuhkan kerjasama lembaga yang efektif di berbagai tingkatan dan di antara antara para pelaku pendidikan (gambar ES.1) (World Bank 2018b).

Kapasitas mengelola pendidikan penting bagi lembaga-lembaga tingkat provinsi, kabupaten/kota dan sekolah. Kapasitas mengelola pendidikan juga penting bagi pemerintah pusat termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di satu sisi, lembaga yang kuat dapat sangat mempengaruhi kualitas interaksi antara pejabat dan penyelenggara pendidikan, dan di sisi lain antara para pemangku kepentingan dan masyarakat sipil, terutama orang tua dan pengusaha.

## Rekomendasi utama laporan

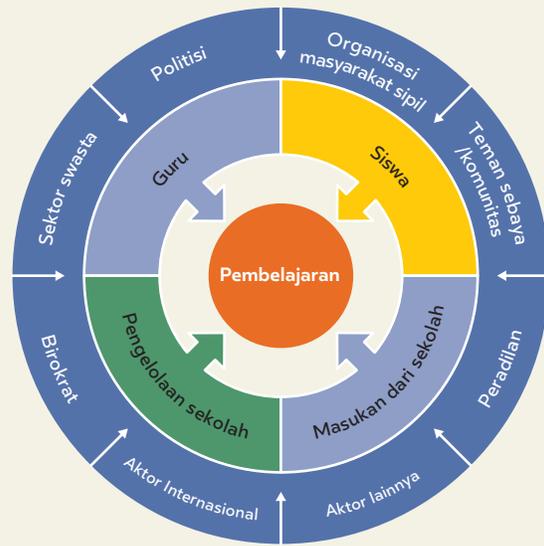
Rekomendasi laporan ini memberikan landasan dalam pembelajaran. Keterkaitan dan koordinasi antar semua pemangku kepentingan utama sangat penting untuk menciptakan koherensi dan keselarasan sistem yang memperkuat pembelajaran (Kotak ES.1). Pada tema umum penguatan pembelajaran, perlu dipastikan bahwa siswa paling tidak mencapai pembelajaran minimum dan pengembangan standar-standar di setiap jenjang pendidikan. Hal ini diharapkan dapat dicapai sesuai dengan anggaran pendidikan nasional yang ada, sesuai dengan analisis dan rekomendasi dalam Kajian Belanja Publik Indonesia: Untuk Hasil yang Lebih Baik (World Bank 2020). Untuk mencapainya, banyak hal yang perlu dilakukan terkait dengan siswa, guru, serta pengelolaan dan input pendidikan. Rekomendasi ini sangat terkait dan bergantung satu sama lain agar sistem pembelajaran dapat berjalan dan berkembang secara menyeluruh.

### Siswa

Sebelum bersekolah, siswa harus sudah dipersiapkan untuk belajar. Persiapan ini setidaknya membutuhkan wajib belajar dua tahun pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan. Cakupan dan kualitas pendidikan anak usia dini perlu diperkuat dengan cara memastikan adanya pendanaan yang cukup dan adanya roadmap untuk mencapai tingkat partisipasi sekolah secara universal pada tahun 2030. Penambahan masa belajar ini juga dapat didorong, khususnya untuk daerah-daerah yang belum memiliki layanan pendidikan anak usia dini, melalui pemberian dana hibah yang dapat digunakan untuk mendirikan layanan baru atau layanan tambahan dan mendorong terjadinya kolaborasi yang lebih baik lagi di antara para pemangku kepentingan.

Memastikan tersedianya pendidikan yang adil dan mendukung siswa yang paling rentan membutuhkan tiga prasyarat. Pertama, adanya tindakan untuk menjamin akses terhadap pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk anak-anak yang paling berpotensi berada di luar sistem. Visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kebijakan yang mengikutinya, perlu selalu difokuskan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama ke sekolah yang berkualitas dan mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kita perlu mempertimbangkan tingkat pembelajaran yang beragam dan mengidentifikasi kabupaten/kota, komunitas, keluarga, dan anak-anak yang terus tidak bersekolah sehingga mereka tertinggal dalam pembelajaran. Untuk memahami

**GAMBAR ES.1** Koherensi dan keselarasan untuk pembelajaran



Sumber: World Bank 2018a.

hal ini, kita perlu menganalisis tantangan yang membuat mereka tidak bersekolah dan menimbulkan ketidakmerataan ini, kemudian mengembangkan kebijakan nasional dan lokal serta praktik sekolah untuk menguranginya.

Kedua, kita perlu memastikan bahwa peserta didik tidak tertinggal oleh langkah yang kita ambil untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang berprestasi paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan ekstra kepada kabupaten/kota, sekolah, dan siswa yang berprestasi rendah. Penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang berkualitas tinggi akan mendiagnosis (mengidentifikasi dan menjelaskan) masalah prestasi yang rendah para siswa dan sekolah dan menjadi basis informasi bagi pengajaran dan pengelolaan sekolah untuk meningkatkan kinerjanya. Guru secara rutin menilai kinerja setiap hari melalui pendekatan evaluasi formatif. Dan data pembelajaran akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi sekolah yang berkinerja paling rendah dan memberikan bantuan tambahan bagi sekolah-sekolah tersebut.

Ketiga, memastikan bahwa semua siswa, termasuk penyandang disabilitas, mencapai keberhasilan. Hal ini memerlukan adanya identifikasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas secepat mungkin sehingga intervensi anak usia dini dapat diberikan. Hal ini menuntut guru untuk mendampingi anak-anak penyandang disabilitas — dan menyertakan mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini membutuhkan penilaian di

masing-masing daerah sejauh mana ketimpangan tingkat pembelajaran ini terkait dengan gender, gangguan bahasa, status sosial ekonomi, kekerasan di sekolah, lokasi, dan pernikahan dini. Dan sekolah kecil di pedesaan dan daerah terpencil harus mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas.

## Guru

Lebih dari 3,3 juta guru mengajar di sekolah di Indonesia setiap hari, serta 294.000 profesor dan dosen di tingkat perguruan tinggi dan 656.000

### **KOTAK ES.1** Dua belas landasan untuk memperkuat pembelajaran

1. Perlu dipastikan bahwa setiap siswa mencapai standar minimal pembelajaran di setiap jenjang pendidikan.
2. Menyediakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua masyarakat.
3. Mengambil langkah untuk menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas terutama bagi anak-anak yang paling berpotensi berada di luar sistem.
4. Mengambil langkah untuk meningkatkan hasil belajar para siswa yang memiliki prestasi paling rendah.
5. Memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus berhasil dalam belajar.
- 6a. Meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan calon guru yang masuk.
- 6b. Rekrut calon guru terbaik dan distribusikan secara efektif.
7. Meningkatkan pengembangan profesional dan menyesuaikan dengan insentif.
8. Memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui pelacakan dan verifikasi data yang lebih baik.
9. Mendukung lembaga yang ada untuk meningkatkan pemberian layanan.
10. Memperluas akses dan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan vokasi.
11. Meningkatkan kualitas, relevansi, dan pemerataan sektor pendidikan tinggi.
12. Sebagai salah satu cara penanganan dan pemulihan COVID-19, perkuat sistem untuk menghadapi guncangan dan tekanan di masa depan.

guru di pendidikan anak usia dini (World Bank 2018b). Agar siswa mendapatkan proses belajar yang berkualitas, proses pengajaran haruslah efektif, karena guru yang terlatih dan termotivasi merupakan unsur paling mendasar dalam belajar setelah faktor dari dalam diri siswa itu sendiri.

Untuk meningkatkan kualitas para pengajar, Indonesia perlu lebih efektif dalam mendampingi para pengajar, baik sebelum mereka mengajar maupun sepanjang karir mereka. Hanya dengan kualitas pengajaran yang terus meningkat, siswa Indonesia akan memperoleh fondasi untuk pembelajaran mereka selanjutnya atau untuk memperoleh keterampilan kerja di abad ke-21 dalam ekonomi global yang kompetitif.

Sebanyak 421 lembaga pendidikan guru di Indonesia menghasilkan lebih dari tiga kali lipat jumlah calon guru yang dibutuhkan oleh sistem pelayanan publik. Dari jumlah calon guru yang sangat besar ini, 300.000 pada tahun 2017, sebagian besar tidak memenuhi syarat. Hal ini terkait dengan fakta bahwa hampir dua perlima dari lembaga pendidikan guru tidak terakreditasi.<sup>6</sup> Orientasi sistem perlu diubah dari aspek kuantitas ke aspek kualitas lulusan guru. Yang mengkhawatirkan, sangat sedikit calon guru yang mencapai skor tinggi pada tes PISA (OECD 2016).

Kualitas pendidikan guru pra-jabatan harus ditingkatkan melalui pembaruan kurikulum, pendekatan gabungan melalui gabungan antara pengajaran dan pembelajaran jarak jauh, daring, dan luring; pengangkatan dosen yang berpengalaman di tingkat pendidikan untuk melatih guru baru; dan memperbanyak praktik pengajaran di sekolah dengan pengawasan yang lebih baik lagi, mulai dari tahun pertama pendidikan calon guru. Hal ini harus dikaitkan dengan keterlibatan yang lebih kuat antara lembaga pendidikan guru dengan badan akreditasi, serta publikasi jumlah lulusan masing-masing lembaga yang lolos menjadi guru PNS.

Indonesia harus berusaha agar hanya mempekerjakan calon guru yang paling memenuhi syarat untuk menjadi guru. Hal ini harus dilakukan dengan cara mendidik dan menggaji mereka dengan gaji yang kompetitif dan menyebarkan mereka secara efisien dan merata di seluruh negeri serta memberikan insentif dan dukungan untuk peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Keterampilan guru perlu terus dikembangkan melalui pengembangan profesional yang lebih efektif, termasuk melalui opsi daring yang berbiaya lebih rendah jika memang terbukti efektif. Mengingat adanya kebutuhan untuk menjangkau lebih dari 4 juta guru, strategi baru harus diuji dan ditingkatkan untuk mempertahankan guru terbaik di kelas. Sistem



evaluasi guru yang kuat harus diterapkan dan dikaitkan dengan insentif berbasis kinerja. Untuk mempersiapkan guru dengan lebih baik, perlu adanya reformasi yang ditargetkan, upaya yang terkoordinasi, dan penegakan peraturan yang jelas dan konsisten di sepanjang pelatihan mandiri dan sistem administrasi yang terdesentralisasi — hal ini menjadi tantangan utamanya.

Kompetensi guru harus terus ditingkatkan melalui pengembangan profesionalitas guru yang berkualitas tinggi, terkait dengan kemajuan dan promosi karir. Ini harus dimulai dengan proses pelatihan pengenalan dan percobaan yang serius dan berlanjut melalui proses penilaian yang sistematis dan teratur. Fokus harus diarahkan pada desain dan pemanfaatan penilaian belajar siswa untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran siswa.

Singkatnya, Indonesia harus memastikan bahwa ia memiliki jumlah guru yang sangat berkualitas di lokasi yang tepat, terutama di sekolah berkinerja rendah, di daerah terpencil, dan pedesaan, dan bahwa guru memberikan kinerja yang maksimal. Mengingat 55 persen guru PNS pensiun selama 10 tahun mulai tahun 2018 (sekitar 960.000 guru),

terdapat peluang dan risiko besar untuk membentuk kembali angkatan kerja guru untuk generasi berikutnya (World Bank 2018c).

### **Pengelolaan dan input**

Pengelolaan dan input sistem pendidikan juga harus diarahkan ke pelaksanaan pembelajaran. Mendukung lembaga yang sudah ada untuk meningkatkan pemberian layanan merupakan cara untuk memastikan bahwa Indonesia dapat melanjutkan reformasinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Bagi sekolah, hal ini berupa adanya dukungan untuk peningkatan kualitas sekolah dan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan landasan-landasan yang sudah ada — kelompok kerja kepala sekolah dan guru,<sup>7</sup> komite sekolah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), sekolah-sekolah berkualitas tinggi, termasuk sekolah rujukan dan sekolah model, dan kantor pendidikan tingkat provinsi beserta pengawasnya. Semua landasan ini membutuhkan pengembangan kapasitas lebih lanjut. “Arsitektur” dukungan yang selaras

yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kinerja guru.

Untuk kabupaten, dibutuhkan staf yang lebih mampu dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan, termasuk mengklarifikasi peran setiap satuan pendidikan dalam meningkatkan hasil pembelajaran dan mensyaratkan staf mereka untuk tetap pada posisi mereka setelah kegiatan pelatihan.

Selain peningkatan kualitas pemberian layanan, di saat yang sama kita juga perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas, sehingga pemangku kepentingan dan pengambil keputusan akan dimintai pertanggungjawaban mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Data merupakan aspek yang sangat penting untuk akuntabilitas tersebut. Kecenderungan dalam pendidikan perlu dilacak lebih baik lagi dengan meningkatkan kualitas database Kemendikbud dan Kemenag. Laporan ini mengusulkan Indeks Kualitas Pendidikan untuk menilai kualitas dan bantuan langsung ke kabupaten dan sekolah yang tertinggal. Transfer dana harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kinerja masing-masing.

### **Mempelajari dan mempromosikan keterampilan untuk dunia kerja**

Pada akhirnya, tujuan pembelajaran dalam pendidikan adalah pengembangan keterampilan yang dapat digunakan setelah lulus sekolah. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara. Untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi, diperlukan adanya peningkatan partisipasi; peningkatan pemerataan, kualitas, dan relevansi; penguatan penelitian dan transfer teknologi; modernisasi tata kelola dan pengelolaan; dan penentuan strategi pembiayaan yang berkelanjutan. Kita memang menyadari pentingnya memperluas akses dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan untuk merespons permintaan yang meningkat, tetapi kita juga perlu menyeimbangkan perluasan akses ini dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Agar lembaga pendidikan vokasi dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja, langkah pentingnya adalah dengan meningkatkan informasi tentang kebutuhan pasar tenaga kerja dan memandu sistem pengembangan keterampilan secara keseluruhan dengan partisipasi yang kuat dari sektor swasta.

### **Mengkoordinasikan banyak pelaku pendidikan**

Dua kementerian utama — Kemdikbud dan Kemenag — mengawasi pendidikan formal dan nonformal.<sup>8</sup> Tetapi kementerian dan lembaga lain juga terlibat, seperti Kementerian Dalam Negeri

**TABEL ES.2 Dampak langsung krisis terhadap sekolah, mulai 6 Juni 2020**

	Jumlah sekolah	Jumlah siswa	Jumlah guru
Total	646,192	62,561,660	3,147,870

*Sumber:* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Update COVID – 19 di Bidang Pendidikan (presentasi), 6 Juni 2020.

*Catatan:* Hal ini mencerminkan penutupan sekolah mulai 6 Juni (berdasarkan update data DAPODIK dan EMIS, Mei 2020).

(Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Undang-undang desentralisasi telah mengubah pengelolaan sekolah yang tadinya di bawah Kemdikbud kemudian dilimpahkan kepada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang mengelola sekitar 646.192 sekolah dan lembaga pembelajaran lainnya di lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Sekitar 42.800 sekolah diklasifikasikan sebagai 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Kapasitas kelembagaan kabupaten yang sangat bervariasi serta kondisi sosial ekonomi dan geografis mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan layanan pendidikan secara efektif dan efisien (World Bank 2017). Mengkoordinasikan begitu banyak pelaku pendidikan di berbagai tingkat bukanlah tugas yang mudah.

Oleh karenanya, penting untuk memahami kompleksitas berbagai pelaku pendidikan dan tantangan untuk mengkoordinasikan upaya mereka menuju tujuan bersama dan menyelaraskannya dengan visi yang koheren. Dengan sistem Indonesia yang kompleks dan melibatkan banyak pelaku pendidikan, hal ini patut dipertimbangkan. Sebagaimana kerangka dalam gambar ES.1 yang menunjukkan bagaimana semua pelaku pendidikan dalam sistem harus bekerja untuk mendukung sistem dan mengarahkan elemen kunci ke arah pembelajaran (guru, siswa, manajemen, dan masukan), rekomendasi di sini mempertimbangkan siapa, apa, dan bagaimana penerapannya. Masalah-masalah ini akan dijelaskan secara rinci dalam bab-bab selanjutnya.

### **Menanggapi tantangan COVID-19**

Pemerintah Indonesia telah bergerak cepat untuk mendukung pembelajaran selama pandemi, melembagakan pembelajaran daring dan TV pendidikan untuk anak usia dini hingga sekolah menengah atas (Surat Edaran Kemendikbud No. 4/2020). Penutupan sekolah, dikombinasikan

## KOTAK ES.2 Mendukung *human capital* selama krisis COVID-19

**Mendukung pembelajaran sekarang** merupakan hal terpenting yang dapat dilakukan oleh kementerian, provinsi, kabupaten, sekolah, dan keluarga. Pelatihan guru dan dukungan lainnya dapat diberikan secara daring untuk beberapa kasus, sementara komunikasi yang jelas dengan orang tua tentang jadwal penayangan program pendidikan di televisi dan program pendidikan lainnya dapat membantu keluarga mengatur anak-anak mereka untuk berpartisipasi dalam pembelajaran jarak jauh. Pendekatan tanpa teknologi, berteknologi rendah, dan berteknologi tinggi untuk mendukung pembelajaran harus tersedia, tergantung pada situasi daerah masing-masing. Saat krisis mereda dalam beberapa bulan mendatang, para guru dan sekolah juga perlu merencanakan pembukaan kembali sekolah yang aman agar tidak memicu gelombang infeksi baru.

**Dampak jangka panjang yang diperkirakan** kemungkinan besar mencakup hilangnya waktu belajar, peningkatan angka putus sekolah, dan meningkatnya ketidaksetaraan pembelajaran dengan potensi dampak jangka panjang pada akumulasi *human capital*. Prediksi waktu belajar yang hilang terjadi di semua tingkat sistem. Anak-anak yang lebih kecil adalah kelompok yang paling tidak memungkinkan untuk belajar mandiri, sementara anak-anak yang lebih besar kemungkinan besar perlu membantu perekonomian keluarga pada situasi lemahnya ekonomi saat ini. Angka putus sekolah diperkirakan paling tinggi terjadi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terutama perguruan tinggi dan sekolah menengah atas (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020). Angka ini kemudian juga diperkirakan paling tinggi khususnya dialami siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, yang sebelum pandemi juga bersekolah pada sekolah yang berkualitas lebih rendah daripada para siswa yang berasal dari keluarga yang lebih kaya. Dan ketimpangan kualitas pendidikan sebelum COVID-19 dengan melihat faktor disabilitas, daerah terpececil, jenis kelamin, dan gangguan bahasa, kemungkinan besar akan semakin parah pasca-COVID-19.

**Tindakan untuk mengurangi dampak krisis** dalam jangka panjang di antaranya dengan

tetap membayar gaji guru untuk mendukung ketahanan mereka terhadap sistem secara keseluruhan. Hal ini terutama penting untuk sekolah swasta nirlaba dan layanan pendidikan anak usia dini berbasis masyarakat yang mungkin tidak menerima murid baru karena meningkatnya kemiskinan keluarga, serta staf terlatih karena kurangnya dana selama pandemi. Saat sekolah dibuka kembali, kita perlu menilai kesenjangan belajar siswa dan membedakan pengajaran berdasarkan tingkat pembelajaran mereka saat ini. Para guru akan perlu dibantu untuk melakukan penilaian pengembangan dan pembelajaran ketika sekolah dibuka kembali dan perlu menindaklanjuti hasil penilaian tersebut dengan pemberian bantuan yang ditargetkan kepada siswa untuk membantu mereka mengejar ketinggalan. Untuk perguruan tinggi, penutupan dan penggabungan pada sebagian perguruan tinggi mungkin tidak terhindarkan karena adanya tekanan keuangan. Namun, proses ini dapat diatur agar dapat mendukung peningkatan kualitas sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan dan agar dapat selaras dengan peluang kerja.

**Meningkatkan ketahanan sistem pendidikan terhadap guncangan** menjadi prioritas karena perubahan iklim, bencana alam, dan ancaman lainnya akan terus berlanjut setelah virus corona ini mereda. Perubahan iklim menghadirkan ancaman semakin tingginya risiko hidrometeorologi, seperti banjir berulang di kota-kota dan tanah longsor serta kekeringan di daerah pedesaan. Banjir merupakan ancaman bagi masyarakat Indonesia, terutama di pusat kota besar, dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan sering terjadi di daerah pedesaan. Kenaikan permukaan laut mengancam 42 juta penduduk Indonesia yang tinggal kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Bahaya iklim dan non-iklim berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur pendidikan, mengganggu proses belajar-mengajar, dan membahayakan nyawa dan mata pencaharian para siswa dan staf pendidikan. Meningkatkan ketahanan sistem melalui investasi dalam kapasitas pengajaran dan pembelajaran daring, sistem penyimpanan data yang sangat aman, dan infrastruktur yang tahan bencana adalah cara untuk mengurangi dampak krisis di masa depan.

dengan penerapan jaga jarak yang efektif untuk masyarakat luas, dapat membantu mengurangi penularan virus. Namun, biaya untuk pembelajaran siswa dan sistem pendidikan secara keseluruhan diharapkan menjadi signifikan dan dapat dirasakan selama bertahun-tahun, tergantung pada bagaimana respons pemerintah pusat dan pemerintah daerah (tabel ES.2). Berdasarkan perkiraan dampak yang dilakukan hanya pada empat bulan pertama penutupan sekolah dari akhir Maret hingga akhir Juli 2020, terjadi penurunan sebelas poin pada skala membaca PISA. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya nilai pendapatan seumur hidup untuk semua siswa yang setara dengan US \$151 miliar, setara dengan 13,5 persen dari PDB tahun 2019. Kerugian ini diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang karena sekolah secara bertahap dibuka kembali (dan mungkin ditutup kembali) (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020).

Pemerintah telah membuktikan dirinya mampu beradaptasi melalui responsnya dengan segera mengalihkan kegiatan belajar ke lembaga TV pendidikan. Hal ini dilakukan ketika semakin jelas ada banyak siswa yang tidak selalu dapat mengakses internet berkecepatan tinggi dan bahwa pendekatan pembelajaran jarak jauh selain daring diperlukan untuk mendukung kesetaraan (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020). Di beberapa daerah, masyarakat dan pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan. Misalnya, di beberapa daerah, Balai Desa menggunakan Dana Desa untuk menyediakan koneksi internet dan materi pembelajaran.<sup>9</sup>

### **Memanfaatkan janji pendidikan**

Sistem pendidikan Indonesia cukup menjanjikan. Untuk memanfaatkan janji tersebut, pembelajaran siswa harus menjadi fokus dan pendorong yang mendasari peningkatan sistem pendidikan Indonesia. Laporan ini akan berfokus pada pembelajaran dan untuk setiap aspek dan tingkat sistem pendidikan Indonesia, pertanyaan seperti apa yang seharusnya diajukan: Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengalihkan fokusnya ke peningkatan pembelajaran? Ke depannya, peningkatan pembelajaran adalah persoalan konteks dan bagaimana penerapan kebijakan dan

intervensinya. Peningkatan kualitas *human capital* Indonesia yang signifikan bergantung pada pergeseran cara sistem pendidikan beroperasi, khususnya dengan menelaraskan dan memperkuat kapasitas, efektivitas, otonomi, dan akuntabilitas guru, kepala sekolah, serta aktor dan lembaga lokal, regional, dan nasional.

Mengingat setengah dari penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun, populasinya sangat muda. Bonus demografi ini — karena Indonesia memiliki lebih banyak pekerja dibandingkan dengan jumlah tanggungannya — sudah terwujud, dan kebijakan yang tepat dapat memastikan bahwa negara akan meraup manfaat dari bonus demografi ini. Banyak kaum muda memasuki dunia kerja dengan potensi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan jumlah populasi kaum muda yang sedang bersekolah perlahan mulai menurun yang pada akhirnya akan menyediakan sumber daya yang sebelumnya selama ini terpakai untuk kaum muda ini untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan generasi selanjutnya (SUPAS 2015). Bonus demografi ini diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2020 hingga 2030, ketika pangsa penduduk usia kerja dan potensi peningkatan output per kapita akan berada pada titik tertinggi. Meskipun rentang kesempatan belajar seumur hidup yang semakin lebar dapat mempertahankan bonus demografi ini lebih lama, peluang yang disajikan oleh bonus ini dengan cepat menghilang saat “generasi emas” ini lulus dari sistem pendidikan — peluang ini akan benar-benar hilang jika pendidikan yang diberikan untuk generasi ini bukanlah pendidikan dengan kualitas terbaik. Namun jika peluang ini dimanfaatkan dan tercipta tenaga kerja yang lebih produktif, Indonesia akan lebih mungkin untuk meraup keuntungan yang diprediksi dapat diperoleh dari Industri 4.0.

Pemerintahan saat ini berencana untuk mengambil tindakan untuk membalikkan kondisi rendahnya *human capital* ini. Pemerintah mengembangkan program ambisius dengan berinvestasi pada manusia untuk meningkatkan hasil kesehatan, gizi, dan pendidikan — yang mana merupakan kunci untuk mengembangkan sumber daya manusia dan angkatan kerja yang lebih produktif.

## Referensi

- Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). 2019. DAPODIK (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah).
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2016. PISA 2015 Results: Excellence and Equity in Education. Vol. 1. Paris, France: OECD. [https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i\\_9789264266490-en](https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en).
- SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus). 2015. Survei Penduduk Antar Sensus.
- SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). 2018. Survei Sosial Ekonomi Nasional.
- World Bank. 2013. Local Governance and Education Performance: A Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts. Jakarta: World Bank.
- . 2017. Indonesia Economic Quarterly, December 2017: Decentralization that Delivers. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29726/125302-WP-P165633-PUBLIC-december-2017.pdf>.
- . 2018a. Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1261-3.
- . 2018b. Indonesia Economic Quarterly: Learning More, Growing Faster. June. Jakarta: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29921>.
- . 2018c. Mapping Indonesia's Civil Service. Washington, DC: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/643861542638957994/pdf/126376-Mapping-Indonesia-Civil-Service-14977.pdf>.
- . 2018d. World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018>.
- . 2019. Indonesia—Realizing Education's Promise: Support to Indonesia's Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education Project (English). Washington, DC: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/253961561860072917/Indonesia-Realizing-Education's-Promise-Support-to-Indonesias-Ministry-of-Religious-Affairs-for-Improved-Quality-of-Education-Project>.
- . 2020. Indonesia Public Expenditure Review 2020: Spending for Better Results. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33954>.
- Yarrow, N., E. Masood, and R. Afkar. 2020. Estimated Impacts of COVID-19 on Learning and Earning in Indonesia: How to Turn the Tide. Jakarta: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34378/Main-Report.pdf>.

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Permendikbud No. 58/2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Atau Bentuk Lain Yang Sed-erajat. [http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permen-dikbud\\_58\\_15.pdf](http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permen-dikbud_58_15.pdf).
- Permendikbud No. 43/2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendaikbud%20Nomor%2043%20Tahun%202019.pdf>.
- UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>. Surat Edaran Kemendikbud No. 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/SE%20Menteri%20Nomor%204%20Tahun%202020%20cap.pdf>.

# Kesimpulan



Laporan Janji Pendidikan di Indonesia membahas pentingnya menangani pembelajaran di seluruh bidang utama pendidikan, di antaranya dengan (1) memperkuat pembelajaran, (2) memulai kesiapan belajar lebih awal, (3) kesetaraan dan inklusi dalam pembelajaran, (4) mempersiapkan dan mendukung guru, (5) mempromosikan keterampilan untuk pasar tenaga kerja, (6) pendidikan tinggi. Perbaikan ke depan melalui kerjasama yang efektif dalam sistem pembelajaran. Silakan baca [laporan lengkap](#) secara rinci tentang masing-masing topik. Bab penutup ini membahas bagaimana cara meningkatkan koherensi sistem sehingga semua aspek mengarah pada pembelajaran siswa.

## Bersekolah untuk belajar

Laporan Pembangunan Dunia tahun 2018 (World Bank 2018a) menekankan bahwa bersekolah tidak dapat selalu disamakan dengan belajar. Untuk melanjutkan reformasi pendidikan dan mencapai hasil yang lebih baik, reformasi di Indonesia harus mencapai kemajuan di tiga bidang.

*Melakukan penilaian pembelajaran dijadikan sebagai tujuan yang serius.* Gunakan penilaian siswa yang dirancang dengan baik untuk mengukur kesehatan sistem pendidikan, bukan sebagai alat untuk memberikan penghargaan dan hukuman. Hal ini juga berarti memanfaatkan hasil dari pengukuran pembelajaran ini untuk menyoroti berbagai eksklusi yang tersembunyi, menjadi dasar dalam membuat pilihan, dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai.

*Menindaklanjuti bukti untuk membuat sekolah memberikan manfaat optimal bagi semua siswa.* Volume dan kualitas bukti metode belajar telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan peningkatan inovasi pendidikan. Indonesia dapat memanfaatkan bukti ini dengan lebih baik untuk menetapkan prioritas praktik dan inovasi pembelajaran di Indonesia.

*Menyelaraskan para pelaku pendidikan agar seluruh sistem dapat berjalan untuk pembelajaran.* Inovasi di ruang kelas tidak akan berdampak banyak jika sistem secara keseluruhan tidak mendukung pembelajaran. Dengan mempertimbangkan hambatan teknis dan politis serta memobilisasi pemangku kepentingan, Indonesia dapat mendukung para pendidik yang inovatif di garis depan.

## Melakukan penilaian pembelajaran untuk menjadikannya sebagai tujuan yang serius

Kualitas pemberian layanan pendidikan dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, kapasitas kelembagaan, politik, pembatasan ad hoc, dan variabel-variabel lainnya. Reformasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkuat penilaian dengan menggunakan ujian berbasis komputer — bersama dengan reformasi struktural yang lebih baru untuk mendesain ulang mekanisme penilaian dan perkembangan pembelajaran siswa sebagai dasar — menuju ke arah yang benar, dan semakin banyak perkembangan diharapkan dalam waktu dekat.

### KOTAK C.1 Mengukur kesehatan sistem pendidikan

Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) adalah mekanisme untuk menilai sampel kompetensi siswa kelas 4. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur kesehatan sistem pendidikan, bukan prestasi masing-masing siswa. Penilaian ini menggunakan sistem penilaian yang mirip dengan PISA, diperkenalkan pada tahun 2016 di Sekolah Dasar dan selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama (2017) dan Sekolah Menengah Atas (2018). Pada pengenalannya di kelas 4, 77 persen siswa diuji pada tingkat pencapaian terendah.<sup>1</sup>

Hingga akhir tahun 2020, AKSI belum diterapkan di madrasah. Kementerian Agama saat ini sedang mempersiapkan penerapan sistem ujian standar berbasis sensus di tingkat sekolah dasar untuk mendukung pemberian layanan dan akuntabilitas yang lebih baik untuk madrasah resmi negeri dan swasta. Ujian tersebut akan dikembangkan dari AKSI yang disusun oleh Kemdikbud dan dilaksanakan pada tahun 2021.

Penilaian baru, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2021 untuk memetakan kompetensi siswa dalam membaca dan berhitung. Kompetensi membaca tidak hanya mengukur kemampuan membaca siswa, tetapi juga tingkat pemahaman membaca siswa. Kompetensi matematika tidak hanya mengukur kemampuan siswa dalam melakukan analisis, tetapi juga kemampuan siswa dalam melakukan operasi matematika. AKM rencananya akan diterapkan di semua sekolah dan madrasah.

Hasil dari berbagai penilaian ini akan digunakan untuk memetakan kompetensi dan prestasi siswa di tingkat sekolah, daerah, dan nasional.

<sup>1</sup> <http://puspendik.kemdikbud.go.id/inap-sd/>

Tradisi ujian dan penilaian berhasil menemukan berbagai kelemahan pembelajaran yang tersebar luas. Indonesia telah berpartisipasi dalam semua ujian internasional utama yang dilaksanakan sejak tahun 1990, termasuk *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Program for International Student Assessment* (PISA). Hal ini memungkinkan dilakukannya perbandingan lintas negara dan lintas waktu dalam hasil pembelajaran yang dapat mengidentifikasi kekuatan dan bidang-bidang yang perlu diperbaiki.

Indonesia baru-baru ini memulai perubahan besar dalam sistem penilaian nasional. Akibat adanya kontroversi Ujian Nasional (UN), UN untuk kelas 6 dibatalkan dan diubah menjadi ujian yang tidak terlalu berisiko yang disebut Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Topik-topik tertentu yang tercakup dalam USBN dipilih di tingkat nasional, kertas ujian dikembangkan di tingkat kabupaten/kota untuk digunakan ke semua sekolah, sehingga tidak dapat dibandingkan antar kabupaten/kota atau antar tahun. Perubahan kebijakan besar lainnya pada Desember 2019, Menteri Maritim mengumumkan penghentian UN kelas 12 dengan menyatakan, “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.”<sup>10</sup> Sementara penilaian nasional yang selama ini pernah dilaksanakan menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, mempertahankan berbagai kemajuan penting yang dicapai dari penilaian berisiko rendah seperti AKSI akan menjadi hal yang sangat krusial agar dapat terus mengukur kesehatan sistem pendidikan (Kotak C.1).

### **Bertindak berdasarkan bukti—agar sekolah memberikan manfaat optimal bagi semua siswa**

Tindakan harus didasarkan pada hasil pengukuran. Untuk melakukannya, hasil pengukuran harus dapat diakses para pemangku kepentingan. Pengukuran pembelajaran dapat mendorong pengambilan tindakan dengan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam penciptaan hasil tersebut dan dengan menyediakan informasi untuk reformasi (World Bank 2018d). Perlu ada informasi tentang pembelajaran untuk membantu para pemangku kepentingan utama, termasuk guru, orang tua, kabupaten/kota, dan provinsi, untuk memanfaatkan informasi tersebut. Informasi ini dapat hadir dalam bentuk penilaian siswa, dan juga dapat hadir dalam bentuk instrumen-instrumen seperti Indeks Mutu Pendidikan

yang diusulkan (lihat bab 5), yang dimaksudkan untuk menggabungkan informasi utama yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan.

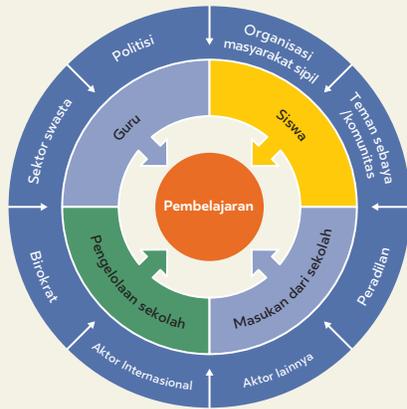
Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memastikan tanggung jawab, keterlibatan, dan pemberdayaan yang lebih besar dari para pelaku pendidikan yang terdesentralisasi dalam menanggapi berbagai tantangan pembelajaran di tingkat lokal. Meningkatkan kualitas pemberian layanan merupakan tantangan yang sangat sulit, tanggapan yang homogen terhadap beragam tantangan di tingkat daerah sangat tidak cocok untuk diterapkan secara nasional. Untuk mendorong tanggapan daerah yang lebih efektif, kabupaten/kota memerlukan dukungan dalam memahami berbagai tantangan pendidikan yang mereka hadapi dan sumber daya yang sudah mereka miliki untuk mengatasi tantangan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak lainnya, dapat mengambil peran yang lebih kuat dalam membantu daerah untuk menentukan tantangan terkait pembelajaran mereka, menyediakan sumber daya untuk menanggapi hambatan-hambatan yang ditemukan, dan memastikan bahwa sistem pendidikan tetap fokus pada pembelajaran. Bupati/Walikota, birokrat, pendidik, dan orang tua perlu memahami bahwa sistem ini gagal menyediakan keterampilan dasar literasi dan berhitung bagi banyak anak. Mereka dapat memahami masalah ini bukan sebagai masalah nasional, tetapi sebagai masalah lokal, yang relevan dengan diri mereka dan anak-anak mereka sendiri. Mereka juga akan mendapat manfaat jika mereka dapat melihat pada bidang apa saja yang dapat diperbaiki, sehingga mereka mengetahui di mana posisinya saat ini untuk memulai perubahan yang lebih baik lagi. Artinya, mereka membutuhkan data yang bermakna di tingkat kabupaten, sekolah, dan kelas. Guru perlu fleksibel dan mampu menyesuaikan pengajaran mereka dengan kebutuhan para siswanya, dan kepala sekolah—dan pengawas sekolah—juga perlu mampu mendukung para guru dalam melakukannya.

### **Kerjasama para pelaku pendidikan— agar seluruh sistem berfungsi untuk pembelajaran**

Sistem pendidikan membutuhkan kerjasama yang efektif antar lembaga di berbagai tingkatan dan semua pelaku pendidikan (gambar C.1) (World Bank 2018a).

Kapasitas mengelola pendidikan penting bagi lembaga-lembaga tingkat provinsi, kabupaten/kota dan sekolah. Kapasitas mengelola pendidikan juga penting bagi pemerintah pusat termasuk

**GAMBAR C.1** Koherensi dan keselarasan untuk pembelajaran



Sumber: World Bank 2018a.

**GAMBAR C.2** Proyeksi tren skor PISA akibat COVID-19



Sumber: Yarrow, Massod, and Afkar 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di satu sisi, lembaga yang kuat dapat sangat mempengaruhi kualitas interaksi antara pejabat dan penyelenggara pendidikan, dan di sisi lain antara pemangku kepentingan dan masyarakat sipil, terutama orang tua dan pengusaha.

Interaksi-interaksi ini terjadi dalam konteks yang dibentuk oleh pengaruh politik dan budaya politik. Politik dapat mendorong ketidaksielarasan ketika terjadi benturan kepentingan pribadi dari berbagai pemangku kepentingan. Ketidaksielarasan dapat terjadi di sepanjang proses pembuatan dan penerapan kebijakan, mulai dari menentukan tujuan hingga merancang dan menerapkan kebijakan hingga mengevaluasi efektivitasnya. Ketidaksielarasan ini mengancam upaya sistem pendidikan untuk menghasilkan pembelajaran (World Bank 2018a).

Seringkali, kebijakan dan investasi di bidang pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana dicatat dalam Laporan Pembangunan Dunia tahun 2018 (World Bank 2018b). Kurangnya penyelarasan ini berpotensi merusak reformasi sistem pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran. Kapasitas pemerintah secara keseluruhan dapat mempengaruhi tindakan yang mempengaruhi pembelajaran siswa, tetapi kapasitas dalam sistem pendidikan kemungkinan besar memiliki dampak yang lebih besar.

Di antara sistem pendidikan terkemuka di Asia Timur, kemajuan dapat dicapai berkat serangkaian pilihan kebijakan yang dirancang sedemikian rupa agar mendorong keselarasan (Wong 2017). Kebijakan-kebijakan ini meliputi penetapan target dan tuntutan hasil, mengadvokasi pendidikan dalam

anggaran belanja nasional, dan memberikan dorongan untuk penyelarasan lintas sektor.

### Dampak dan tanggapan terhadap pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 diperkirakan akan berdampak besar dan negatif terhadap kemajuan di semua sektor pembangunan manusia. Salah satunya adalah sektor pendidikan, di mana kami memperkirakan bahwa anak-anak Indonesia telah kehilangan 16 poin pada bidang membaca di PISA dan setara dengan hilangnya pendapatan US \$367 perorangan per tahun di masa depan akibat periode penutupan selama empat bulan dari 24 Maret hingga akhir September 2020 (gambar C.2) (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020). Kami menggunakan instrumen pengukuran yang dipergunakan oleh Kantor Bank Dunia di negara lain untuk mensimulasikan dampak COVID-19 terhadap pembelajaran dan hasil belajar di sekolah. Selain itu, kami juga menggunakan data dari survei yang mengukur kualitas layanan pendidikan di Indonesia untuk mensimulasikan dan mengontekstualkan potensi dampak penutupan sekolah akibat COVID-19 terhadap perkiraan hasil pembelajaran, tingkat kemahiran, pendaftaran, dan pendapatan siswa Indonesia pada jenjang sekolah dasar dan menengah (Azevedo et al. 2020). Perkiraan untuk skenario penutupan delapan bulan menunjukkan bahwa kerugian ini diperkirakan akan meningkat karena sekolah secara bertahap dibuka kembali (dan mungkin ditutup kembali). Mengingat akses yang tidak setara ke sumber daya untuk mendukung pembelajaran saat sekolah ditutup, anak-anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan diperkirakan akan kehilangan lebih banyak waktu belajar daripada

anak-anak dari keluarga lebih kaya (Yarrow, Mas-sod, dan Afkar 2020).

Gambar C.3 merangkum alur perubahan saat ini dan alur perubahan potensial terkait dampak COVID-19 pada pendidikan, termasuk peningkatan angka putus sekolah karena beban ekonomi dan hilangnya pendapatan. Jika, pada Juli 2020, guncangan pendapatan sebesar -1,1 persen, Angka Putus Sekolah (APS) diperkirakan akan meningkat sebesar 0,13 poin persentase untuk siswa sekolah dasar, setara dengan 48.175 anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Di tingkat sekolah menengah, peningkatan APS diperkirakan 0,15 poin persentase, setara dengan 43.031 anak putus sekolah. Model tersebut memperkirakan bahwa, ketika rumah tangga kehilangan pendapatan, angka putus sekolah akan meningkat seiring dengan meningkatnya opportunity cost atau biaya peluang untuk bersekolah (Yarrow, Massod, dan Afkar 2020).

Seperti negara lain, ketika sekolah dibuka kembali, Indonesia kemungkinan akan mengalami kemunduran pada dalam kemajuan TPB yang selama ini telah dicapai. Kemiskinan keluarga, kematian ibu dan anak, gizi buruk, dan stunting kemungkinan besar akan meningkat, dan tingkat imunisasi, produksi makanan, dan partisipasi dalam layanan PPAUD dan sekolah kemungkinan besar akan menurun. Berbagai bukti kemunduran serta upaya pemerintah dan pihak lain untuk mengurangi dampak negatif di bidang ini telah berhasil dikumpulkan (laporan Bank Dunia yang akan datang).

Dalam hal pendidikan, baik Kemenag maupun Kemendikbud cukup gesit dalam menanggapi keadaan darurat COVID-19 sebagai bagian dari inisiatif pemerintah pusat dan daerah. Pada akhir Maret, sekolah mulai ditutup berdasarkan rekomendasi dari pemerintah pusat, dengan semua sekolah dari PAUD hingga perguruan tinggi ditutup pada awal April, berdampak terhadap lebih dari 68 juta siswa (Surat Edaran Kemendikbud No. 4/2020).<sup>11</sup> Dana BOS semakin dibuat fleksibel agar dana dapat digunakan untuk tanggap COVID di tingkat sekolah. Salah satu langkah Kemendikbud adalah dengan memprakarsai kemitraan pembelajaran daring dengan penyedia swasta untuk menyediakan akses gratis ke perangkat EdTech dan meluncurkan program TV pendidikan nasional pada 13 April 2020. Kemenag memberikan pelatihan dan dukungan bagi para guru menggunakan platform daring dan menjangkau kepala sekolah untuk lebih memahami kebutuhan para guru. Ujian Nasional telah dibatalkan untuk tahun akademik 2020.

Ke depannya, masih banyak yang harus dilakukan untuk membantu memperbaiki sistem dan mempercepat pembelajaran dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Berdasarkan bukti anekdot dan

pengalaman dari konteks lain, beberapa dampak di bawah ini mulai muncul dan diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang:

- Secara keseluruhan, investasi dalam pendidikan dapat menurun drastis jika ketersediaan anggaran publik minim akibat kontraksi ekonomi dan berkurangnya penerimaan pajak serta jika dana dialihkan ke sektor lain. Dalam jangka pendek, APBN-P 2020 diprioritaskan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan perlindungan kepada usaha kecil dan menengah dalam menghadapi wabah COVID-19. Namun, dengan amanat konstitusi sebesar 20 persen, pendidikan tetap mendapat alokasi 20 persen. Kemdikbud telah mengumumkan realokasi Rp 405 miliar untuk mendukung peningkatan kapasitas dan sumber daya di rumah sakit pendidikan serta untuk konten pendidikan tentang COVID-19.
- Subsektor PPAUD kemungkinan lebih terdampak negatif daripada jenjang pendidikan lainnya. Sekolah dan taman kanak-kanak yang mendapat bantuan pemerintah kemungkinan akan mempertahankan guru mereka selama pandemi dan akhirnya dapat dibuka kembali. Tetapi banyak layanan PPAUD swasta dan berbasis komunitas dilaporkan telah ditutup. Tanpa adanya gaji, staf akan keluar. Kapasitas tenaga kerja, yang dibangun selama tahun-tahun sebelumnya, dapat terkikis oleh pandemi. Orang tua yang terkena dampak negatif secara ekonomi mungkin akan tidak memasukkan anaknya ke layanan PPAUD.
- Kesenjangan, ketidaksetaraan, dan eksklusivitas yang ada di sekolah dan dalam pembelajaran sebelum COVID-19 kemungkinan akan diperburuk oleh dampak pandemi. Sebagian besar anak-anak penyandang disabilitas saat ini telah kehilangan banyak layanan khusus yang biasanya mereka terima dari program PAUD dan sekolah mereka. Anak-anak ini cenderung kembali mendapatkan pendidikan yang jauh lebih tertinggal dari teman-teman sebayanya yang tidak menyandang disabilitas. Anak-anak dari keluarga miskin, dan mereka yang dirugikan oleh kesenjangan akses digital (terutama anak-anak di pedesaan dan daerah terpencil) juga cenderung tertinggal jauh di belakang teman-teman mereka yang lebih kaya. Rumah tangga cenderung menghabiskan lebih sedikit untuk masukan pendidikan, dan kemungkinan keluarga memutuskan untuk mengalihkan sekolah dari sekolah berbiaya tinggi ke sekolah berbiaya rendah, tergantung pada tingkat kontraksi ekonomi. Angka putus sekolah juga dapat meningkat drastis, terutama pada siswa dari keluarga termiskin yang kemungkinan akan kesulitan membayar biaya pendidikan dan

GAMBAR C.3

## Alur perubahan sistem pendidikan pada krisis COVID-19



Sumber: Rogers and Sabarwal 2020.

memerlukan anak-anak mereka yang lebih tua untuk bekerja guna menambah pendapatan keluarga. (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020).

- Suplai dari pendidikan tinggi dan pendidikan teknik dan kejuruan swasta diperkirakan akan menyusut karena penurunan pendaftaran akan menyebabkan penurunan biaya sekolah dan biaya lainnya. Hal ini akan memengaruhi kemampuan lembaga-lembaga ini untuk membayar gaji dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya. Permintaan untuk pendidikan pada jenjang ini juga kemungkinan akan menurun seiring dengan kontraksi ekonomi yang diperkirakan akan muncul. Siswa yang telah membayar uang sekolah untuk pengajaran tatap muka intensif — terutama untuk kursus yang memerlukan ruang kelas atau praktik laboratorium — mungkin menganggap pendidikan dari dan jarak jauh sebagai alternatif yang buruk. Universitas dengan teknologi dan materi yang diperlukan untuk pembelajaran daring akan semakin unggul dibandingkan universitas yang belum memiliki kapasitas tersebut. Demikian pula, siswa dengan akses ke teknologi yang dibutuhkan untuk mengikuti proses pembelajaran semacam itu akan semakin unggul dibandingkan yang tidak memilikinya. Dengan kata lain, tingkat kemampuan pengalihan pembelajaran sekolah dan universitas dari ruang kelas ke komputer pasti akan berdampak pada kesenjangan dalam pembelajaran antara siswa yang diuntungkan karena memiliki akses ke teknologi tersebut dan siswa yang kurang beruntung karena tidak memilikinya.

Kesenjangan digital ini akan menjadi masalah di semua jenjang pendidikan. Dan jenjang

itu memang nyata terjadi. Misalnya, rumah tangga perkotaan di Indonesia hampir dua kali lebih mampu untuk mengakses ke internet, broadband tetap, komputer, dan radio daripada rumah tangga pedesaan—ini merupakan bukti nyata dari kesenjangan digital perkotaan-pedesaan dan yang paling umum terjadi antara keluarga kaya-miskin (tabel C.1) (Hadi 2018).

### Apa saja pilihan yang ada untuk mengurangi dampak COVID-19 pada sektor pendidikan?

Saat ini diperlukan dukungan untuk pengembangan kesehatan dan pembelajaran. Tindakan saat ini harus mendukung pembelajaran melalui opsi daring, TV pendidikan, dan dukungan teknis dan moral untuk staf pendidikan dan keluarga. Hal ini penting di saat krisis, seperti halnya layanan berbasis pendidikan yang terkait dengan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Terus tetap membayar gaji guru penting untuk menjamin ketahanan sistem secara keseluruhan.

Saat sekolah dibuka kembali, kita perlu memastikan staf tersedia, dan orang tua mendaftarkan kembali anak-anak mereka ke sekolah. Menyadari bahwa kesenjangan pembelajaran akan meningkat akibat pandemi, kita juga perlu menilai kesenjangan belajar siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik siswa baru maupun siswa lama, untuk memberikan dukungan tambahan kepada mereka yang paling kurang beruntung, dan untuk membedakan pengajaran berdasarkan tingkat pemahaman masing-masing siswa saat ini. Dukungan sosioemosional tambahan akan diperlukan bagi siswa yang mungkin terkena dampak negatif akibat penutupan sekolah dan lingkungan

rumah yang tidak kondusif. Perpanjangan tahun ajaran mungkin diperlukan untuk membantu siswa mengejar ketertinggalan pelajaran.

Ketidaksesuaian yang ada antara kecepatan kurikuler dan tingkat pemahaman siswa perlu diatasi, dan siswa mungkin perlu dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan di semua jenjang kelas. Guru perlu dibantu untuk melakukan penilaian pasca masuk sekolah ini. Siswa tidak boleh ditahan atau dikucilkan dari sekolah, dan harus ada identifikasi terhadap kebutuhan dan kelemahan setiap siswa yang diperparah oleh pandemi. Harus ada tindak lanjut melalui pemberian bantuan yang ditargetkan untuk mengejar ketertinggalan siswa. Pengalaman ini juga harus meningkatkan keterampilan guru dalam penilaian formatif dan pengajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswa untuk nantinya diterapkan di luar tanggap COVID-19. Meskipun pembelajaran tidak mungkin bisa dipercepat hingga mampu mengejar ketertinggalan di tahun akademik pertama setelah pembukaan sekolah kembali, kita masih dapat mengorientasikan kembali sistem ke arah pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan siswa dan membedakan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa daripada memaksakan mengikuti kecepatan kurikuler.

Untuk perguruan tinggi, penutupan dan penggabungan pada sebagian perguruan tinggi mungkin tidak terhindarkan karena adanya tekanan keuangan. Namun, mekanisme mitigasi berikut dapat membantu meningkatkan kualitas sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan dan membantu menyelaraskannya dengan peluang kerja:

- Mendukung pendaftaran melalui perluasan dan peningkatan KIP-Kuliah, yakni tunjangan untuk pendidikan tinggi yang diterima oleh siswa berpenghasilan rendah.
- Mendukung adanya konsolidasi antara perguruan tinggi swasta ke sejumlah lembaga yang berkualitas tinggi dengan memudahkan perpindahan siswa dari lembaga kecil berkinerja rendah ke lembaga besar yang berkomitmen untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kredit tanpa biaya kepada perguruan tinggi swasta yang memenuhi kriteria pengukuran dan kualitas minimum dan bersedia menerima siswa pindahan dari sekolah swasta lain.
- Mendukung institusi pendidikan tinggi dalam berkontribusi pada ketahanan sistem secara keseluruhan melalui investasi dalam pendidikan daring, dan meminta mereka mempersiapkan diri terhadap potensi bencana iklim atau bencana alam berikutnya yang dapat mengganggu pembelajaran berbasis kampus. Dalam beberapa kasus, kualitas dapat ditingkatkan dengan beralih ke pembelajaran daring, terutama di bidang-bidang seperti bahasa asing di mana pembelajaran berbasis institusi dapat melingkupi pengajaran daring oleh penutur asli.

Diskusi terperinci tentang dampak penutupan sekolah dan rekomendasi strategi untuk mendukung pengajaran tatap muka yang lebih baik, serta peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh dibahas pada Yarrow, Masood, dan Afkar (2020).

**TABEL C.1 Indikator TIK Indonesia (persen)**

	Total	Pedesaan		Perkotaan	
		Akses Rumah Tangga	Penggunaan Individu	Akses Rumah Tangga	Penggunaan Individu
Internet	36.0	26.3	32.5	48.5	41.7
Broadband seluler	93.3	95.4	—	93.3	—
Broadband tetap	7.8	7.4	—	14.3	—
Ponsel	84.4	79.5	70.1	90.7	76.4
Smartphone	—	—	59.2	—	70.7
Non-smartphone	—	—	61.5	—	49.4
Keduanya	—	—	20.7	—	20.1
Komputer	31.4	22.1	20.4	43.4	38.5
Telepon rumah	4.5	1.4	—	8.5	—
TV	87.7	82.6	67.0	94.2	81.2
Radio	40.0	26.3	20.5	48.5	31.3

Sumber: Hadi 2018.

**TABEL C.2 Ringkasan rekomendasi utama**

Apa kebutuhannya?	Rekomendasi	Siapa	Bagaimana
Memperkuat pembelajaran	1. Perlu dipastikan bahwa setiap siswa mencapai standar minimal pembelajaran di setiap jenjang pendidikan	Kemendikbud Kemdagri Kemenag Provinsi Kabupaten/Kota Pengawas tingkat lokal Kelompok kerja guru dan kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemendikbud perlu mengurangi dan merevisi indikator Standar Nasional Pendidikan dan berfokus pada aspek pendidikan yang dapat diukur dan diamati yang terkait dengan pembelajaran.</li> <li>• Pemangku kepentingan di pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran dan rencana peningkat pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.</li> <li>• Kemendagri perlu meminta rencana dan menilai kemajuan menuju pencapaiannya; Kemdikbud perlu memberikan bantuan teknis.</li> <li>• Kemendikbud perlu merevisi kurikulum nasional.</li> </ul>
Mulai lebih awal	2. Menyediakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua masyarakat	Kemdikbud (DG ECED PAUD dan Pendidikan Masyarakat) Kemenag Bappenas Kemdagri Kemdes Provinsi Kabupaten/Kota Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah, dipimpin oleh Kemdikbud, perlu membuat kebijakan tentang program wajib belajar dua tahun pra-sekolah; membagikan roadmap untuk mencapai hal ini pada tahun 2030</li> <li>• Pemerintah, dipimpin oleh Kemdikbud, untuk memprioritaskan dan menargetkan pendanaan untuk memastikan bahwa anak-anak yang paling tereksklusi dari layanan PPAUD (misalnya, penyandang disabilitas, anak-anak dari keluarga miskin dan pedesaan) dapat menyelesaikan dua tahun pendidikan dasar.</li> <li>• Kabupaten/kota dapat meningkatkan alokasi untuk PPAUD dalam anggaran pendidikan yang ada dan mencari alternatif, sementara Kemenkeu dan Kemdikbud dapat merintis pendekatan inovatif untuk pendanaan secara nasional.</li> <li>• Melaksanakan kampanye sosialisasi di tingkat daerah dan nasional yang terintegrasi untuk mendorong minat dan pendaftaran di layanan PPAUD yang lebih tinggi.</li> <li>• Meningkatkan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan PAUD dan meningkatkan pengumpulan data tentang layanan, guru, dan peserta didik PAUD.</li> </ul>
Memberikan pembelajaran untuk semua	3. Mengambil langkah untuk menjamin akses yang adil ke pendidikan dan pembelajaran berkualitas baik untuk anak-anak yang paling tereksklusi dari sistem	Kemdikbud Kemenag Provinsi Kabupaten/Kota Sekolah Guru Pengawas Principal and teacher working groups LPMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para pemimpin di semua tingkatan untuk berkomitmen kembali energi dan sumber daya yang tersedia untuk memastikan akses yang adil ke pendidikan berkualitas baik.</li> <li>• Kemdikbud dan Kemenag dapat terus meningkatkan sistem manajemen pendidikan untuk memfokuskan fokus khusus pada ketidakhadiran dan eksklusi untuk membantu mengidentifikasi populasi dan anak-anak yang tereksklusi.</li> <li>• Perbarui alat pengelolaan berbasis sekolah untuk memasukkan indikator eksklusi seperti tidak terdaftar, mengulang, putus sekolah, dan tingkat kelulusan.</li> </ul>
	4. Mengambil langkah untuk meningkatkan hasil belajar para siswa yang memiliki prestasi paling rendah	Kemdikbud Kemenag Provinsi Kabupaten/Kota Sekolah Guru Pengawas Kelompok kerja guru dan kepala sekolah LPMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemdikbud dan Kemenag akan melaksanakan penilaian nasional yang pada awalnya untuk mengidentifikasi ketimpangan pembelajaran.</li> <li>• Memanfaatkan penilaian kelas utama sebagai bagian dari pelatihan guru dalam jabatan untuk memastikan bahwa guru tahu bagaimana cara memanfaatkan informasi ini untuk membantu para siswanya.</li> <li>• Memanfaatkan data pembelajaran siswa untuk mengidentifikasi 40 persen sekolah dan siswa berprestasi terendah.</li> <li>• Sekolah dan kabupaten yang terus berkinerja rendah akan menerima dukungan kapasitas khusus.</li> <li>• Sekolah dan guru memberikan dukung khusus untuk siswa berprestasi terendah.</li> </ul>
Melayani semua	5. Memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus berhasil dalam belajar	Kemdikbud Kemenag Kemos Provinsi Kabupaten/Kota Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan bantuan kepada siswa yang berpotensi tinggi tidak meneruskan sekolah dan melakukan identifikasi sedini mungkin.</li> <li>• Hilangkan hambatan untuk meneruskan sekolah dengan mengadaptasi lingkungan belajar yang dibutuhkan.</li> <li>• Melatih guru sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus; menyempurnakan kurikulum agar lebih inklusif.</li> <li>• Menggunakan dana BOS, BOP-PAUD untuk mengurangi biaya sekolah, PIP digunakan untuk subsidi bagi keluarga kurang mampu untuk memasukkan anaknya ke sekolah.</li> </ul>

(lanjutan)

Apa kebutuhannya?	Rekomendasi	Siapa	Bagaimana
Peningkatan kemampuan mengajar guru	6a. Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan guru dan calon mahasiswanya	Kemdikbud Kemenag Kemendagri LPTK KEMENPAN RB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merevisi kebijakan dan peraturan perizinan operasional dan pembentukan LPTK baru untuk mengontrol jumlah dan kualitas calon guru.</li> <li>Untuk memastikan jumlah calon murid yang tepat, Ditjen Dikti dan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag dapat mengidentifikasi LPTK yang memenuhi syarat dan kuota masing-masing LPTK.</li> <li>Proses akreditasi untuk LPTK dapat diperkuat dan dikaitkan dengan proses perizinan (termasuk mengurangi jeda waktu antara perizinan dan akreditasi).</li> <li>Memberikan pendanaan dan dukungan teknis kepada BAN – PT untuk memastikan BAN-PT memiliki kapasitas dan kewenangan untuk proses akreditasi yang bermakna.</li> <li>Memberi insentif kepada LPTK untuk memenuhi penguatan sistem akreditasi menggunakan hibah/pembiayaan.</li> <li>Tutup LPTK yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar akreditasi dalam waktu dekat.</li> <li>Kemdikbud dan Kemenag dapat menetapkan standar kompetensi calon guru baru.</li> </ul>
	6b. Rekrut calon guru terbaik dan mendistribusikannya secara efektif	Kemdikbud Kemenag Kemendagri KemenPAN-RB Provinsi Kabupaten/Kota Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemdikbud dan Kemenag dapat membantu menarik calon guru terbaik dengan meningkatkan visibilitas dan meningkatkan status dan reputasi LPTK yang terakreditasi.</li> <li>Hindari tekanan politik dalam perekrutan.</li> <li>Kemdikbud, Kemenag, KemenPAN-RB, dan Kemendagri dapat menetapkan standar minimum untuk mempekerjakan guru lintas jenis kontrak dengan bekerja sama dengan provinsi dan kabupaten.</li> </ul>
	7. Meningkatkan pengembangan profesional dan disesuaikan dengan insentif	Kemdikbud Kemenag Kemendagri Provinsi Kabupaten/Kota Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemdikbud dan Kemenag akan menetapkan dan menegakkan prosedur untuk induksi, masa percobaan, dan penilaian guru.</li> <li>Memperkuat kelompok kerja untuk mendukung upaya mereka dalam meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan antarsekolah.</li> <li>Provinsi dan kabupaten membutuhkan pengawas untuk memantau dan mengawasi penilaian siswa oleh guru; ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengajaran dan pembelajaran.</li> <li>Kemdikbud dan Kemenag akan memasukkan penilaian siswa formatif dan sumatif dalam penilaian guru.</li> <li>Kemenag dan Kemdikbud, yang bekerja di tingkat nasional dan daerah, dapat mengatasi kesenjangan gender, terutama untuk kepala sekolah, dengan mendorong dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi guru perempuan untuk menjadi pegawai negeri dan kepala sekolah.</li> <li>Kabupaten dan provinsi akan bereksperimen dengan cara meningkatkan akuntabilitas melalui insentif.</li> </ul>
Pengelolaan untuk pembelajaran	8. Memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui pelacakan dan verifikasi data yang lebih baik	Kemdikbud Kemenag Kemendagri Orang tua (komite sekolah) Guru Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemendagri dan Kemdikbud mengembangkan indeks mutu pendidikan sederhana yang menggambarkan standar layanan minimum yang ditingkatkan, SPN, dan ukuran pembelajaran siswa.</li> <li>Kemdikbud dan Kemenag mewajibkan kabupaten untuk mengevaluasi pembelajaran siswa di jenjang pendidikan dasar, mendukung mereka dalam strategi untuk meningkatkan pembelajaran.</li> <li>Kabupaten untuk mengkomunikasikan hasilnya kepada orang tua dan guru, mendukung sekolah dan guru untuk mengatasi kesenjangan.</li> <li>Sekolah menggunakan hasil untuk meningkatkan kualitas praktik guru, memobilisasi dukungan masyarakat, dan memberikan layanan tambahan bagi siswa.</li> <li>Kemdikbud untuk mendukung sekolah dan provinsi untuk meningkatkan pelaporan data; Kemendagri akan mengamankan verifikasi data secara independen, dengan sanksi finansial jika terjadi kesalahan pelaporan.</li> </ul>
	9. Mendukung lembaga yang ada untuk meningkatkan pemberian layanan	Kemdikbud Kemenag Kemendagri Kabupaten/Kota Provinsi Guru Kelompok kerja guru dan kepala sekolah Komite sekolah LPMP LPTK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung peningkatan sekolah dan tingkatkan hasil belajar siswa dengan membangun kapasitas pelaku pendidikan yang ada, seperti kelompok kerja, komite sekolah.</li> <li>Memberi insentif dan meminta pertanggungjawaban kabupaten melalui penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan kapasitas serta dukungan.</li> <li>Meningkatkan program insentif berbasis kinerja seperti BOS Kinerja untuk memasukkan karakteristik yang transparan dan dapat diamati yang terkait dengan pembelajaran siswa dan mengukur peningkatan kinerja.</li> </ul>

(lanjutan)

Apa kebutuhannya?	Rekomendasi	Siapa	Bagaimana
Peningkatan pendidikan tenaga kerja	10. Memperluas akses dan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan vokasi	Kemnaker Kemdikbud Kemenag Kemenkeu BAPPENAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendirikan Dewan Pengembangan Keterampilan dengan partisipasi yang kuat dari sektor swasta.</li> <li>• Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan informasi tentang kebutuhan pasar kerja dan memandu sistem pengembangan keterampilan secara keseluruhan dengan partisipasi yang kuat dari sektor swasta.</li> <li>• Kemnaker mengkoordinasikan pengembangan kerangka kerja kompetensi yang merefleksikan kebutuhan sektor swasta, mengembangkan sistem informasi pasar tenaga kerja.</li> <li>• Lembaga pendidikan vokasi perlu meningkatkan kapasitasnya agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.</li> <li>• Menyeimbangkan ekspansi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat.</li> <li>• Pastikan bahwa lembaga pendidikan vokasi memiliki infrastruktur dan guru yang tepat untuk memberikan kerangka kompetensi.</li> <li>• Memperluas fitur dan penggunaan SISNAKER untuk sistem informasi pasar kerja yang lebih baik guna memantau evolusi permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan juga untuk menyediakan informasi kepada pencari kerja mengenai lowongan pekerjaan.</li> <li>• Kemdikbud dapat memperluas revitalisasi program SMK dengan evaluasi hasil saat ini.</li> <li>• Kemenkeu dapat menetapkan pembiayaan langsung ke badan akreditasi universitas dan lembaga pendidikan vokasi untuk menjamin kemandirian dan kapasitas untuk melakukan akreditasi.</li> <li>• Kemendikbud dapat meningkatkan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi dengan memberikan kebebasan yang lebih besar bagi lembaga pendidikan tinggi asing untuk memberikan layanan kepada siswa Indonesia di seluruh negeri..</li> </ul>
Meningkatkan kinerja pendidikan tinggi	11. Meningkatkan kualitas, relevansi, dan pemerataan sektor pendidikan tinggi	Kemdikbud Kemenag Institusi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta BAN-PT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pendaftaran perguruan tinggi Indonesia dan meningkatkan kesetaraan dengan menghilangkan hambatan pendaftaran untuk kelompok yang kurang terwakili, meningkatkan tingkat kelulusan untuk kelompok yang kurang terwakili melalui dukungan non-moneter seperti program penjangkauan dan retensi dan memperluas pendaftaran di Universitas Terbuka.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud dan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan (Diktis) Kemenag dapat mengartikulasikan dan menerapkan strategi pengembangan bakat secara proaktif bagi staf akademik.</li> <li>• Ditjen Dikti dan Diktis dapat memberikan insentif pada diversifikasi sumber daya keuangan untuk lembaga publik, dan memperkenalkan alokasi keuangan berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas dan relevansi.</li> <li>• Memperkuat penelitian dan transfer teknologi melalui kemitraan publik-swasta, hubungan universitas-industri dan internasionalisasi kurikulum dan pendaftaran siswa.</li> <li>• Modernisasi tata kelola dan pengelolaan, termasuk kerangka peraturan yang lebih fleksibel untuk institusi berkinerja tinggi untuk berinovasi.</li> <li>• Kemdikbud dan Kemenag akan menggabungkan perguruan tinggi swasta kecil dan berkualitas rendah, meningkatkan mutu perguruan tinggi; dan mengembangkan sistem informasi manajemen bersama yang komprehensif.</li> <li>• Kemenkeu akan membiayai BAN-PT untuk memastikan kemandirian dan kapasitas untuk melakukan akreditasi.</li> </ul>
Meningkatkan ketahanan sistem pendidikan terhadap guncangan eksternal	12. Sebagai salah satu tanggap dan pemulihan COVID-19, perkuat sistem untuk menghadapi guncangan dan tekanan di masa depan	Kemdikbud Kemenag Institusi perguruan tinggi Pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas perangkat keras dan perangkat lunak untuk pembelajaran jarak jauh.</li> <li>• Meningkatkan kapasitas guru, siswa, dan kelembagaan untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran jarak jauh.</li> <li>• Berinvestasi dalam keamanan data dan kemampuan komunikasi.</li> <li>• Semua investasi infrastruktur baru untuk memaksimalkan efisiensi energi dan ketahanan terhadap bahaya.</li> </ul>

BAN-PT = Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BAPPENAS = Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, BOP-PAUD = Bantuan Operasional Pendidikan, BOS = Biaya Operasional Sekolah, LPMP = Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPTK = Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, Kemdikbud = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenkeu = Kementerian Keuangan, Kemdagri = Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker = Kementerian Tenaga Kerja, Kemenag = Kementerian Agama, Kemosos = Kementerian Sosial, Kemdes = Kementerian Desa, PPAUD = Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini, SNP = Standar Nasional Pendidikan.

## Rekomendasi ke-12: Sebagai bagian dari tanggapan dan pemulihan COVID-19, perkuat sistem untukantisipasi guncangan dan tekanan di masa depan

Apa saja yang dapat diubah atau ditingkatkan untuk meningkatkan ketahanan sistem pendidikan terhadap guncangan eksternal? Jika penurunan waktu belajar dan peningkatan putus sekolah tidak dimitigasi secara efektif, bisa jadi akan ada efek makro jangka panjang pada pengembangan sumber daya manusia dan meningkatnya ketidakefektifan. Tapi COVID-19 bukanlah satu-satunya peristiwa yang akan menyebabkan efek ini. Secara lebih luas, sistem pendidikan akan terus rentan terhadap guncangan eksternal. Secara nasional, pengendalian pembangunan yang lemah dan perencanaan yang tidak memadai telah memungkinkan terjadinya pembangunan di daerah yang rawan risiko, di antaranya risiko banjir, gempa bumi, dan penurunan tanah. Seiring dengan meningkatnya risiko krisis iklim, cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan perubahan iklim lainnya, maka risiko tersebut juga meningkat bagi siswa, guru, dan infrastruktur sekolah, universitas, dan kantor pemerintah.

Perubahan iklim dan bencana alam adalah topik yang perlu mendapat perhatian lebih di seluruh sektor pendidikan, termasuk untuk konten kurikulum nasional, sekolah individu dan kesiapsiagaan bencana pemerintah daerah, pembangunan sekolah dan peningkatan infrastruktur, serta studi dan penelitian tingkat tinggi. Belajar dari tahap awal tanggap COVID-19 menunjukkan pentingnya pengembangan sistem pendidikan yang tahan terhadap guncangan semacam itu, apa pun bentuk guncangan tersebut. Hal ini berarti bahwa konten dan infrastruktur pembelajaran jarak jauh harus tetap ada — baik daring, TV, atau berbasis radio — dan bahwa guru harus menjadi lebih terampil dalam menjalankan peran sentral yang dapat mereka mainkan dalam memotivasi dan mendukung siswa bahkan dari jarak jauh. Di bidang lain, kebijakan nasional tentang investasi infrastruktur baru untuk pendidikan dapat mengamankan peningkatan efisiensi energi, penggunaan tenaga surya, dan pengurangan bahaya terkait dengan banjir, gempa bumi, atau naiknya air laut. Menyadari pentingnya ketahanan semacam ini dan mulai membangun struktur dan kapasitas untuk memastikan ada mungkin merupakan salah satu dari sedikit hasil positif dari peristiwa COVID-19.

Informasi yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa Kemdikbud sedang merencanakan revisi kurikulum nasional dengan bekerja sama dengan

Kemenag dan pemangku kepentingan utama lainnya.<sup>12</sup> Revisi ini dapat mencakup banyak informasi lainnya tentang perubahan iklim dan bahaya alam pada tingkat yang sesuai dengan tingkatan kelas. Informasi dan latihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana adalah tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi dapat didukung melalui perangkat komunikasi yang dikembangkan di tingkat nasional, termasuk melalui kurikulum nasional.

### Sintesis rekomendasi

Rekomendasi dari laporan ini (tabel C.2) memberikan landasan untuk pembelajaran, dan bahwa keterkaitan serta koordinasi di antara semua pemangku kepentingan utama sangat penting untuk memberikan koherensi dan penyesuaian sistem agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.

### Keterkaitan rekomendasi

Rekomendasi dalam laporan ini sangat saling terkait dan bergantung satu sama lain agar sistem dapat berfungsi dan berkembang secara keseluruhan.

### Pembelajaran

Tema menyeluruh mengenai penguatan pembelajaran diatur dalam Rekomendasi 1: *Perlu dipastikan bahwa setiap siswa mencapai standar minimal pembelajaran di setiap jenjang pendidikan.* Untuk mencapainya, banyak hal yang perlu dilakukan terkait dengan siswa, guru, serta pengelolaan dan masukan.

### Siswa

Sebelum bersekolah, siswa harus sudah dipersiapkan untuk belajar. Ini merupakan awal yang baik untuk semua anak, seperti yang dijelaskan dalam Rekomendasi 2: *Menyediakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua masyarakat.* Persiapan ini membutuhkan setidaknya kewajiban dua tahun pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan. Perlu memperkuat cakupan dan kualitas PPAUD dengan memastikan pendanaan yang memadai, dan mengembangkan roadmap untuk mencapai pendaftaran PPAUD universal pada tahun 2030. Perluasan PPAUD juga dapat diberi insentif, terutama di daerah tanpa layanan PPAUD, melalui hibah untuk layanan baru atau tambahan dan dengan mendorong kolaborasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan.

Memastikan pendidikan yang adil dan mendukung siswa yang paling rentan dapat diatasi melalui tiga rekomendasi.

Rekomendasi 3: *Mengambil langkah untuk menjamin akses yang adil ke pendidikan dan pembelajaran berkualitas baik untuk anak-anak yang paling tereksklusi dari sistem.* Penting untuk memastikan bahwa visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kebijakan turunan darinya, selalu difokuskan untuk memastikan bahwa SEMUA anak memiliki akses yang adil ke sekolah yang berkualitas dan mendapat kesempatan untuk belajar. Kita perlu mempertimbangkan tingkat pembelajaran yang beragam dan mengidentifikasi kabupaten, komunitas, keluarga, dan anak-anak yang terus tereksklusi dari sekolah sehingga tertinggal dalam pembelajaran. Untuk memahami faktor-faktor ini, kita perlu menganalisis tantangan yang menyebabkan eksklusi dan ketidaksetaraan, kemudian mengembangkan kebijakan nasional dan lokal serta praktik sekolah untuk menguranginya.

Memastikan bahwa peserta didik tidak ketinggalan pelajaran dibahas dalam Rekomendasi 4: *Mengambil langkah untuk meningkatkan hasil belajar para siswa yang memiliki prestasi paling rendah.* Hal ini dapat berupa memprioritaskan pemberian dukungan ekstra kepada kabupaten/kota, sekolah, dan siswa yang berprestasi rendah. Penilaian siswa nasional berkualitas tinggi akan mendiagnosis (mengidentifikasi dan menjelaskan) masalah prestasi rendah para siswa dan sekolah dan menjadi basis informasi dalam pengajaran dan pengelolaan sekolah untuk meningkatkan kinerjanya. Guru secara rutin menilai kinerja setiap hari melalui pendekatan evaluasi formatif. Dan data pembelajaran akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi sekolah dengan kinerja paling rendah dan memberikan bantuan tambahan kepada sekolah-sekolah tersebut.

Rekomendasi 5: *Memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus berhasil dalam belajar.* Hal ini perlu adanya identifikasi anak-anak penyandang disabilitas secepat mungkin sehingga intervensi anak usia dini dapat diberikan. Hal ini menuntut guru untuk mendampingi anak-anak penyandang disabilitas — dan menyertakan mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini membutuhkan penilaian di masing-masing daerah sejauh mana ketimpangan tingkat pembelajaran ini terkait dengan gender, gangguan bahasa, status sosial ekonomi, kekerasan di sekolah, lokasi, dan pernikahan dini. Dan sekolah kecil di pedesaan dan daerah terpencil harus mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas.

## Guru

Pembelajaran harus dibimbing dan didukung, dengan lebih menekankan pada membantu peningkatan kapasitas guru. Rekomendasi 6a: *Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan guru dan calon guru yang masuk,* Rekomendasi 6b: *Rekrut calon guru terbaik dan distribusikan secara efektif,* dan Rekomendasi 7: *Meningkatkan pengembangan profesional dan menyesuaikan insentif untuk mengatasi persediaan, alur, dan kualitas guru.* Rekomendasi 6a melibatkan peningkatan lembaga pelatihan guru melalui perizinan dan akreditasi yang lebih baik serta melalui penguatan dukungan teknis dan keuangan yang ditargetkan — terutama di wilayah Timur — untuk mendorong peningkatan kualitas dan peningkatan peringkat akreditasi. Yang juga penting adalah menjadi lebih selektif dengan mendaftarkan lebih sedikit calon guru dan memastikan bahwa jumlah guru tersebut memiliki kualitas yang lebih tinggi. Rekomendasi 6b dan 7 melibatkan peningkatan kualitas pengajaran, termasuk melalui perekrutan yang lebih baik, penempatan, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Terdapat kebutuhan untuk memastikan cukup banyak guru yang berkualifikasi tinggi di lokasi yang tepat, terutama di sekolah pedesaan, di daerah terpencil, dan sekolah-sekolah berkinerja rendah. Mereka harus terus didukung agar dapat meningkatkan keterampilan mereka, dengan penekanan khusus pada pelantikan guru baru dan metode pengembangan profesional yang efektif seperti kelompok kerja guru. Akan bermanfaat juga untuk bereksperimen dalam meningkatkan akuntabilitas guru melalui insentif.

## Pengelolaan dan input

Pengelolaan dan masukan dari sistem juga harus diarahkan untuk penyampaian pembelajaran. Rekomendasi 8: *Memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui pelacakan dan verifikasi data yang lebih baik,* di mana para pemangku kepentingan dan pembuat keputusan dimintai pertanggungjawaban untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Data sangat penting untuk akuntabilitas, dan kita perlu melacak tren pendidikan dengan lebih baik lagi dengan meningkatkan database Kemendikbud dan Kemenag. Indeks Mutu Pendidikan yang diusulkan akan digunakan untuk mengukur akuntabilitas dan mengarahkan bantuan ke kabupaten/kota dan sekolah yang tertinggal. Rekomendasi 9: *Mendukung lembaga yang ada untuk meningkatkan pemberian layanan* termasuk memastikan bahwa Indonesia dapat melanjutkan reformasinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di tingkat sekolah, hal ini melibatkan dukungan

untuk peningkatan kualitas sekolah dan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan landasan-landasan yang sudah ada — kelompok kerja kepala sekolah dan guru, komite sekolah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), sekolah-sekolah berkualitas tinggi, termasuk sekolah rujukan dan sekolah model, dan kantor pendidikan tingkat provinsi beserta pengawasnya. Semua landasan ini membutuhkan pengembangan kapasitas lebih lanjut. “Arsitektur” dukungan yang selaras yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kinerja guru. Di tingkat kabupaten/kota, dibutuhkan staf yang lebih mampu dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan, termasuk memperjelas peran setiap unit Dinas Pendidikan dalam meningkatkan hasil pembelajaran dan meminta staf Dinas untuk tetap pada posisi mereka setelah kegiatan penguatan kapasitas. Aspek keuangan harus memuat secara jelas keterkaitan secara eksplisit antara transfer dana daerah dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan.

#### ***Mempelajari dan mempromosikan keterampilan untuk dunia kerja.***

Tujuan pembelajaran dalam pendidikan adalah pengembangan keterampilan yang dapat digunakan setelah lulus sekolah. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara. Untuk keterampilan teknis dan kejuruan, Rekomendasi 10: *Memperluas akses dan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan vokasi* menyadari pentingnya memperluas akses dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan untuk merespons permintaan yang meningkat, tetapi juga perlu menyeimbangkan perluasan ini dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Agar lembaga pendidikan vokasi dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja, langkah pentingnya adalah dengan meningkatkan informasi tentang kebutuhan pasar tenaga kerja dan memandu sistem pengembangan keterampilan secara keseluruhan dengan partisipasi yang kuat dari sektor swasta. Untuk sistem perguruan tinggi, Rekomendasi 11: *Meningkatkan kualitas, relevansi, dan pemerataan sektor pendidikan tinggi*, bidang-bidang yang harus ditangani di antaranya meningkatkan tingkat pendaftaran perguruan tinggi Indonesia dan meningkatkan kesetaraan, meningkatkan kualitas dan relevansi, memperkuat penelitian dan transfer teknologi, memodernisasi tata kelola dan pengelolaan, dan menetapkan strategi pembiayaan yang berkelanjutan.

Indonesia telah menciptakan kemajuan besar dalam perjalanannya membangun *human capital*, tetapi pencapaian ini menemui berbagai ancaman di berbagai bidang. Perubahan iklim adalah pendorong peristiwa cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan perpanjangan penutupan sekolah dan terkadang hilangnya nyawa. Gempa bumi dan bencana alam lainnya dapat mengancam penyediaan layanan pendidikan, terkadang berdampak pada wilayah yang luas untuk jangka waktu yang lama. Ancaman lain seperti penyakit dapat menjadi tantangan terhadap seluruh ekonomi dan masyarakat seperti yang telah kita lihat saat pandemi ini. Indonesia dapat mendukung pengembangan *human capital* dengan meningkatkan ketahanan sistem pendidikan terhadap guncangan, misalnya dengan mengamankan sistem data, meningkatkan kapasitas belajar mengajar jarak jauh, dan meningkatkan infrastruktur untuk efisiensi energi dan terhadap bahaya. Meningkatkan ketahanan sistem memang menantang dan akan membutuhkan sejumlah investasi, tetapi hal tersebut diperlukan untuk membantu mengamankan masa depan pembelajaran. Rekomendasi 12: *Sebagai salah satu tanggap dan pemulihan COVID-19, perkuat sistem untuk menghadapi guncangan dan tekanan di masa depan.*

#### **Tema umum untuk penerapan di seluruh sistem**

Tujuan dan rekomendasi juga memuat tema, pertimbangan kontekstual, dan pendekatan umum.

#### ***Koordinasi antar banyak pelaku pendidikan***

Kita sangat perlu mempertimbangkan pelaku pendidikan dan bagaimana mereka dapat berkoordinasi dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Tidak ada rekomendasi yang dapat dicapai pelaku pendidikan yang bekerja sendiri-sendiri dan mungkin ke arah yang berbeda. Kita perlu bekerja dengan mencapai keselarasan dan visi yang koheren. Dengan sistem Indonesia yang kompleks dan banyak pelaku pendidikan, hal ini memiliki relevansi khusus. Sebagaimana kerangka kerja di atas menunjukkan bagaimana semua pelaku pendidikan dalam sistem harus bekerja untuk mendukung sistem dan mengarahkan elemen-elemen utamanya — guru, siswa, pengelolaan, dan masukan — ke arah pembelajaran, rekomendasi di atas mempertimbangkan siapa, apa, dan bagaimana penerapannya (seperti yang telah dirincikan pada masing-masing bab).

### *Kesetaraan sebagai pertimbangan utama dan pendorong untuk mengarahkan dukungan kepada mereka yang paling membutuhkan*

Terdapat tema umum dalam bab-bab dan rekomendasi untuk mendukung mereka yang kurang beruntung — mereka yang memiliki keterbatasan, mereka yang tertinggal atau berkinerja rendah, atau mereka yang mendapatkan akses yang kurang adil. Untuk setiap elemen sistem, penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan memastikan dukungan bagi mereka yang paling rentan atau tertinggal, baik siswa, sekolah, kabupaten/kota, maupun provinsi.

### *Pengukuran untuk pemahaman, pengambilan keputusan, dan pengarahan*

Pengukuran dapat berperan dalam menilai situasi, menentukan kemajuan, mengarahkan dukungan dan sumber daya, dan menerapkan mekanisme untuk mendorong kemajuan dan pencapaian. Indonesia memang mengumpulkan cukup banyak data, tetapi langkah selanjutnya untuk analisis dan keputusan yang efektif berdasarkan analisis tersebut sangatlah penting. Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut dapat digunakan sebagai bentuk akuntabilitas. Tetapi untuk menghindari mencemari atau mendistorsi hasil, hasil tersebut tidak boleh secara eksplisit dikaitkan dengan akuntabilitas.

### *Pertimbangan ekonomi politik*

Dalam mempertimbangkan aspek siapa, apa, dan bagaimana untuk tujuan dan rekomendasinya, dimensi ekonomi politik menjadi penting untuk dilihat. Terkadang, solusi terbaik dari segi teknis tidak dapat dilaksanakan dari perspektif politik, sehingga kendala pelaksanaan dan faktor ekonomi politik harus dipertimbangkan. Sistem Indonesia yang kompleks membutuhkan pertimbangan cermat tentang apa yang dapat kita lakukan.

## **Langkah Ke depan**

Kepemimpinan baru telah memberlakukan reformasi besar dalam periode waktu yang singkat. Kemendikbud dan Kemenag dengan dukungan dari Kemenkes dan Kemendagri telah bergerak cepat untuk mendukung pembelajaran ketika sekolah-sekolah ditutup akibat COVID-19 (Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran selama Pandemi COVID-19 2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan — bersama dengan kabinet dan di bawah bimbingan presiden — telah menetapkan atau merencanakan reformasi “Kebebasan Belajar” di bidang-bidang berikut:

## **Penilaian**

- USBN dihapus.
- UN dihapus.
- Rencana Pembelajaran Guru tidak lagi diperlukan.
- Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, kompetensi inti untuk tes internasional seperti PISA, TIMSS, dan PIRLS diusulkan. AKM akan mencakup Survei Karakter dan Lingkungan Belajar untuk mengukur aspek non-kognitif untuk mendapatkan gambaran holistik tentang kualitas pendidikan.

## **Sekolah**

- Melaksanakan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah (SD – SMP – SMA/SMK, pendidikan informal): Kolaborasi dan pembinaan antar sekolah melalui Sekolah Penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, dan pendidikan informal berbasis nilai. Hal ini termasuk proyek percontohan dengan 100 Sekolah Penggerak di provinsi-provinsi pendukung, untuk memelopori inisiatif Kebebasan Belajar melalui pendampingan, dukungan sebaya, dan pemanfaatan teknologi pada ekosistem sekolah. Sekolah Penggerak akan menjadi katalisator untuk mengubah sekolah di sekitarnya dan menjadi pusat pelatihan guru.
- Mentransfer BOS langsung ke sekolah dari Kemenkeu.
- Meningkatkan proporsi BOS yang dapat digunakan untuk menunjang gaji guru.
- Meningkatkan nilai BOS.
- Meningkatkan kualitas pelaporan BOS.
- Mengadaptasi zonasi sekolah agar lebih fleksibel.
- Membangun ruang kelas dan ruang belajar di masa depan yang kreatif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman, serta didukung oleh teknologi—tetapi juga aman dan inklusif.

## **Guru**

Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah dengan memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, dan penilaian, serta mengembangkan platform pembelajaran komunitas. Hal ini termasuk Guru Penggerak, generasi baru guru sekolah yang diberikan pelatihan tambahan dan pelatihan di tempat kerja, yang akan menjadi sumber daya di sekolah dan daerah mereka.

## Sistem

- Membangun platform teknologi untuk mendorong kolaborasi pemangku kepentingan, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pendekatan yang fleksibel, dan meningkatkan Platform Pendidikan Nasional dalam lima tahun, dimulai dengan marketplace BOS.
- Perencanaan sarana dan prasarana teknologi pendukung.
- Menyesuaikan kurikulum, pedagogi, dan metode penilaian untuk memelihara kompetensi yang sesuai untuk generasi mendatang. Hal ini mencakup kurikulum yang disederhanakan, fleksibel, dan berorientasi pada kompetensi serta personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan penilaian berkala.
- Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan dan bekerja dengan pemerintah daerah melalui pendekatan personal dan konsultatif serta meritokrasi.
- Pemberian insentif bagi kontribusi dan kerjasama swasta di bidang pendidikan melalui dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), insentif perpajakan, kemitraan pemerintah swasta, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar.
- Meningkatkan kredibilitas dan memperbaiki mekanisme akreditasi melalui proses berbasis data dan sukarela, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan membuat perbandingan global.

## Perguruan Tinggi

- Mengurangi peran pemerintah pusat dalam membuat program gelar baru. Akreditasi berlaku selama 10 tahun, dan dapat dilakukan secara internasional.
- Status otonomi diberikan atas permintaan.
- Fleksibilitas mahasiswa dalam program studi.
- Mempromosikan kepemilikan industri dan otonomi pendidikan kejuruan.
- Mendorong industri atau asosiasi untuk terlibat dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan pendidikan didanai melalui kontribusi sektor swasta atau CSR.
- Model kolaborasi pendidikan kejuruan yang terkait dengan industri dan dunia kerja; jalur fleksibel antara pendidikan menengah dan tinggi.
- Platform teknologi *link and match* sebagai alat perencanaan karir siswa, yang dikembangkan oleh pemangku kepentingan—industri, asosiasi profesional, dan sebagainya—dan difasilitasi oleh pemerintah.

Daftar yang tidak lengkap ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, dan sejalan dengan banyak rekomendasi di halaman sebelumnya. Sebagian besar perubahan hingga saat ini berada dalam lingkup Kemendikbud, namun diharapkan perubahan lebih lanjut akan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Kemenag, Kemendagri, Kemenkeu, dan kementerian lain serta pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan ini, reformasi ini perlu dilakukan dan dipertahankan dari waktu ke waktu. Untuk itu, kebijakan baru harus diterapkan di tingkat kabupaten dan provinsi dan didukung penuh oleh Kemendikbud dan kementerian lainnya. Jika kita tidak mampu mengatasi tantangan-tantangan ini, kita akan menghambat dampak reformasi sebelumnya.

## Penutup

Sistem pendidikan Indonesia cukup menjanjikan. Untuk memanfaatkan janji tersebut, pembelajaran siswa harus menjadi fokus dan pendorong yang mendasari peningkatan sistem pendidikan Indonesia. Laporan ini akan berfokus pada pembelajaran dan untuk setiap aspek dan tingkat sistem pendidikan Indonesia, pertanyaan seperti apa yang seharusnya diajukan: Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengalihkan fokusnya ke peningkatan pembelajaran? Ke depannya, peningkatan pembelajaran adalah persoalan konteks dan bagaimana penerapan kebijakan dan intervensinya. Peningkatan kualitas *human capital* Indonesia yang signifikan bergantung pada pergeseran cara sistem pendidikan, khususnya dengan menyelaraskan dan memperkuat kapasitas, efektivitas, otonomi, dan akuntabilitas guru, kepala sekolah, serta pelaku pendidikan dan lembaga lokal, regional, dan nasional.

## Referensi

- Azevedo, P.J., G. Koen, D. Goldemberg, A. Hasan, and S.A. Iqbal. 2020. "Country Tool for Simulating COVID-19 Impacts on Learning and Schooling Outcomes, Version 5." World Bank, Washington DC.
- Hadi, Aulia. 2018. "Bridging Indonesia's Digital Divide: Rural-Urban Linkages?" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 22 (17).
- Rogers, H. and S. Sabarwal. 2020. *The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses*. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33696>.
- UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). 2004. *Early Education Financing: What is Useful to Know?*

UNESCO Policy Brief on Early Childhood, No. 23, Mei. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000137412>.

World Bank. 2018a. *Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific*. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1261-3.

World Bank. 2018b. *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018>.

World Bank. Forthcoming. *High Frequency Household Surveys 2020*. Washington, DC: World Bank.

Wong, A. 2017. "Insights from East Asia's High-Performing Education Systems: Leadership, Pragmatism, and Continuous Improvement." Background paper for *Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific*. Washington, DC: World Bank.

Yarrow, N., E. Masood, and R. Afkar. 2020. *Estimated Impacts of COVID-19 on Learning and Earning in Indonesia: How to Turn the Tide*. Jakarta: World Bank. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/184651597383628008/pdf/Main-Report.pdf>.

Yarrow, N., E. Masood, and R. Afkar. Forthcoming. *Measuring the Quality of Education Services in Indonesia*. Jakarta: World Bank. Learning is "flat"

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran selama Pandemi COVID-19. 2020. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/wp-content/uploads/2020/06/SKB-PEMBELAJARAN-TA-BARU-MASA-COVID-19.pdf>.

Surat Edaran Kemendikbud No. 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/SE%20Menteri%20Nomor%204%20Tahun%202020%20cap.pdf>. Inequality is still a major proble

## Catatan Akhir

<sup>1</sup> State Address, Agustus 2019

<sup>2</sup> Catatan Negara Indonesia: Program Penilaian Pelajar Internasional: Hasil dari 2018: [https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018\\_CN\\_IDN.pdf](https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf).

<sup>3</sup> Kemenag merupakan bagian 15 persen dari sistem pendidikan pra-sekolah dan tidak terdesentralisasi.

<sup>4</sup> World Bank berdasarkan data Kemendikbud 2019. <https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id>.

<sup>5</sup> Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2019, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar>.

<sup>6</sup> <http://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/15/mayoritas-lptk-belum-terakreditasi.html>.

<sup>7</sup> Untuk laporan studi pokja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagai wadah dan jejaring pendukung pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (Juni 2019), INOVASI bersama Kemendikbud melakukan studi kasus pokja di Nusa Tenggara Barat dengan menyoroti permasalahan dan menunjukkan peningkatan hasil belajar. [https://www.inovasi.or.id/wp-content/uploads/2019/07/19\\_07\\_19-INOVASI-KKG-KKKS-Study-ENG.pdf](https://www.inovasi.or.id/wp-content/uploads/2019/07/19_07_19-INOVASI-KKG-KKKS-Study-ENG.pdf)

<sup>8</sup> Fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (RisetDikti) dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Oktober 2019.

<sup>9</sup> Menteri Kemendesa mengatakan dalam konferensi virtual bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk menyediakan internet gratis <https://republika.co.id/berita/qej3iy335/mendes-dana-desa-bisa-untuk-penyediaan-internet-gratis>. Kominfo, kepala desa diimbau untuk mengoptimalkan dana desa untuk membangun infrastruktur internet [https://kominfo.go.id/content/detail/11946/kepala-desa-diimbau-optimalkan-dana-desa-untuk-bangun-infrastruktur-internet/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/11946/kepala-desa-diimbau-optimalkan-dana-desa-untuk-bangun-infrastruktur-internet/0/sorotan_media). Di Jawa Tengah seorang kepala desa di Jawa Tengah menemukan cara untuk mengatasi masalah kuota internet <https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/660479/pakai-dana-desa-kades-di-jateng-atasi-problem-kuota-dengan-internet-gratis>. Di Bengkulu, Bupati Bengkulu Selatan meminta seluruh kepala desa memasang koneksi internet di semua desa menggunakan dana desa. <https://bengkuluekspress.com/optimalisasi-dd-pasang-internet-desa/>.

<sup>10</sup> <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar>.

<sup>11</sup> Perkiraan awal dampak COVID-19 berdasarkan data terbaru dari DAPODIK dan EMIS, Maret 2020

<sup>12</sup> Lihat contohnya di: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/07/tekanan-prinsip-keberlanjutan-mendikbud-sampaikan-target-merdeka-belajar-15-tahun-ke-depan-dana-desa>. <https://bengkuluekspress.com/optimalisasi-dd-pasang-internet-desa/>.





